

## **Kerjasama Kaum Muslim dan Kaum Komunis Pasca-Revolusi Bolshevik 1917: Sebuah Pengantar**

BEN FOWKES DAN BÜLENT GÖKAY\*

Diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Dwi Platomo  
Disunting oleh Redaksi *Jurnal Sosialis*

---

Dengan kemenangan kaum Bolshevik pada Oktober 1917 pilihan-pilihan strategis harus dibuat. Banyak pembaharu Muslim pra-revolusioner, kaum Jadid, berupaya bekerja di bawah naungan sistem Soviet. Hal ini dimungkinkan oleh kebijakan-kebijakan moderat yang dijalankan oleh kaum Bolshevik. Mereka juga menyerukan umat Muslim untuk melibatkan diri dalam suatu jihad melawan penjajahan Barat. Tahun 1920-an merupakan masa emas kerjasama antara kedua pihak. Di Indonesia, pemberontakan 1926 berilhamkan komunis dan Islam. Namun, kerjasama antara komunisme dan Islam tidak bertahan lama. Setelah kematian Stalin, terbuka jalan bagi pembaruan kerjasama antara gerakan-gerakan komunis dan umat Muslim yang mencapai kesuksesan sementara di Syria, Iraq, Mesir, dan Indonesia, kemudian disusul oleh kudeta-kudeta anti-komunis pada 1960-an. Perang Afghanistan pada 1980-an memaksa partai-partai komunis diasingkan dan merangsang kebangkitan Islam Politik. Runtuhnya Uni Soviet membuat partai-partai komunis terombang-ambing, dengan kebebasan untuk menentukan kebijakan-kebijakan mereka sendiri.

---

*Timur adalah kawah revolusioner yang mampu menyalakan obor revolusi ke seluruh Eropa Barat (Sultan-Galiev, 1920) <sup>1</sup>*

Sulit untuk memberikan sebuah paparan singkat tentang hubungan antara komunisme dan Islam, sebagian karena luasnya bidang ini, sebagian lagi karena tak ada petunjuk mutakhir yang tersedia. Yaacov Ro'i baru-baru ini menghasilkan suatu kajian rinci tentang periode pasca-1941, namun itu pun terbatas pada Islam di Uni Soviet.<sup>2</sup> Di samping itu, kita hanya dapat membangun kesimpulan lewat banyak penelitian ahli yang teruji yang telah diterbitkan mengenai aspek-aspek pembahasan ini. Kekurangan dalam literatur ini sangat perlu dibenahi. Hal itu tak dapat dijawab di sini, tapi kami berharap dalam pengantar singkat ini, setidaknya, dapat menunjukkan beberapa jalur pendekatan yang mungkin.

---

\* **Ben Fowkes**, profesor tamu kehormatan London Metropolitan University, Inggris. Ia juga dikenal sebagai penerjemah karya Marx edisi Penguin, *Das Kapital*. **Bülent Gökay**, profesor Hubungan Internasional, Sekolah Politik, Hubungan Internasional dan Filsafat, Keele University.

Hubungan antara kubu Marxis dengan Islam politik merujuk kembali ke masa revolusi Rusia 1917. Revolusi Rusia terjadi di sebuah kekaisaran yang dulunya merupakan rumah bagi 16 juta umat Muslim – sekitar 10 persen dari populasi. Kaum Bolshevik mewarisi kekaisaran multinasional dan multi-keyakinan tsar yang luas, di mana umat Muslim telah menderita begitu parah di tangan rezim. Runtuhnya tsarisme membuat jutaan umat Muslim menjadi radikal, yang menuntut kebebasan agama dan hak-hak nasional yang dirampas dari mereka oleh kekaisaran. Penggulingan tsarisme disambut antusias oleh kaum minoritas non-Rusia; kongres-kongres Muslim diadakan di Moskow dan Kazan pada 1917. Dengan agitasi untuk mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa yang tertindas dan pembagian tanah bagi para petani, kaum Bolshevik memenangkan dukungan yang cukup untuk membawa revolusi menuju daerah-daerah non-Rusia. Kebebasan agama merupakan aspek penting dari kebebasan nasional yang dipromosikan oleh kaum Bolshevik bagi mereka yang tertindas oleh kekaisaran Rusia sebelumnya. Bolshevisme menjadi pilihan yang menarik bagi banyak umat Muslim, yang “bergabung bersama ke dalam organ-organ baru pemerintahan yang dibangun oleh rezim Soviet”<sup>3</sup>. Salah satu dekret pertama Lenin ditujukan “bagi muslim-muslim dari Rusia dan Timur yang menderita”, yang keluh-kesahnya diupayakan untuk diatasi oleh Bolshevik. Pada Kongres Seluruh Rusia Kedua oleh Organisasi Komunis Muslim (November 1919), Lenin menyatakan: “Revolusi Sosialis tidak akan menjadi semata-mata, atau, utamanya, suatu perjuangan dari kaum proletar revolusioner di setiap negara melawan kaum borjuisnya. Tidak! Ini akan menjadi sebuah perjuangan dari semua jajahan dan negara-negara yang ditindas oleh imperialisme, dari semua negara-negara yang tak merdeka, melawan imperialisme internasional.”<sup>4</sup> Kaum Bolshevik menyambut para Muslim kiri ke dalam pos-pos mereka, dan sebagai hasilnya, sekitar 15 persen dari anggota Partai Komunis adalah umat Muslim; di wilayah-wilayah Asia Tengah, umat Muslim mengisi 70 persen keanggotaan Partai. Lenin menegaskan bahwa perlu mendukung gerakan-gerakan Islamis di bawah kondisi-kondisi di mana mereka sedang melawan kelas-kelas penguasa lokal, kontrol penjajah, atau keduanya. “Kerjasama menakjubkan” ini dibela mati-matian oleh Lenin berhadapan dengan orang-orang yang percaya bahwa komunis tidak seharusnya berurusan dengan aktivisme agama. Ia berpendapat, sangatlah penting meyakinkan gerakan-gerakan seperti itu di dunia “kolonial”, bahwa masa depan mereka terletak bersama kaum pekerja Eropa melawan kekuatan-kekuatan imperialis, dan bahwa sebuah pendekatan ganda diperlukan.

### **Jadidiah dan Bolshevisme**

Gerakan pembaruan Muslim di Kekaisaran Rusia muncul selama abad ke-19 sebagai *usul-i jaded* (“metode baru”), sebuah program pembaruan pendidikan yang secara bertahap berkembang menjadi suatu gerakan politis. Pemimpin Jadid yang paling terkenal adalah Ismail Bey Gaspirali (alias Gasprinskii), seorang Tatar berkebangsaan Krimea (Ukraina) yang mengenyam pendidikan Eropa dan bekerja sebagai seorang wartawan di Istanbul dan Paris. Pada 1883, ia menerbitkan *Tercüman*, yang menjadi manifestasi utama kampanye Jadid untuk memodernisasi amaliah umat Muslim, dengan cakupan isu dari ekonomi hingga institusi-institusi keagamaan. Ismail Bey percaya, hubungan politik dan budaya yang berubah cepat antara umat Muslim dan negara-negara Barat dan rakyatnya menciptakan kondisi yang tepat bagi suatu pembaruan Islami yang langsung dan cepat

pula. Ismail Bey mengunjungi Asia Tengah, dan di bawah pengaruhnya, sekolah-sekolah Jadid dibuka di Andijan pada 1897, dan di Samarkand dan Tokmak pada 1898.<sup>5</sup>

Setelah Revolusi 1917, beberapa anasir gerakan Jadid berpaling kepada semacam "Sosialisme Islam". Tetapi, seperti Adeeb Khalid catat baru-baru ini, Jadidiyah tak boleh "dilihat sebagai sebuah gerakan yang utuh, sebagaimana sering dilakukan dalam literatur yang ada. Kelompok Jadid dari Asia Tengah menggunakan simbol-simbol, kiasan-kiasan serta metafor-metafor yang sama sebagaimana kelompok Jadid Rusia Eropa dalam wacana mereka, tetapi hal-hal ini tidak memiliki makna yang sama dengan sendirinya – pengertian-pengertiannya didasarkan pada kenyataan-kenyataan lokal".<sup>6</sup> Kita lebih tepat memikirkan Jadid dalam kerangka upaya-upaya pembaruan Muslim dari berbagai jenis, yang berbeda-beda tujuan dan hasilnya seturut lokasi mereka di kekaisaran Rusia. Di kalangan Tatar Kazan, gerakan pembaruan mengambil bentuk radikal. Ia mengambil posisi nasionalis, sosialis, dan anti-Rusia, dan membentuk benih-benih bagi komunisme Tatar, seperti tampak pada tokoh-tokoh seperti Mulla-Nur Vahitov dan Sultan Galiev.<sup>7</sup> Di Dagestan, sebaliknya, para pembaharu Muslim jauh lebih moderat. Perhatian utama mereka, seperti diceritakan kepada kita, adalah membela diri terhadap tuduhan-tuduhan bahwa usulan-usulan mereka untuk reforma tanah bertentangan dengan hukum Islam atau syariat. Faktanya, mereka merupakan Muslim yang lebih taat dibanding lawan-lawan tradisional mereka. "Pada Kongres Petani Agustus 1917, syariat dijadikan otoritas tertinggi, karena disampaikan beberapa kutipan tertentu darinya, yang menyatakan bahwa tanah adalah milik petani yang menggarapnya. Kelompok pro-syariat dikalahkan oleh syariat dari kelompok sosialis dan para petani yang tak bertanah".<sup>8</sup> Di Turkistan, kelompok Jadid yang membangun negara otonom Khokand pada Desember 1917 menggunakan retorika yang sejenis dengan retorika fundamentalis, menyerukan "kembali kepada syariat".<sup>9</sup> Di Bukhara, para pemuda Bukhara pada awalnya tidak mampu menggulingkan kekuasaan teokratik *emir*, yang waktu itu disokong oleh mayoritas penduduk.<sup>10</sup> Kebijakan-kebijakan setelah mereka akhirnya berkuasa pada 1920 menjadi benar-benar moderat. Menurut Artikel 26 konstitusi 1921 Republik Rakyat Bukhara, "tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan asas-asas dasar Islam".<sup>11</sup>

Bagaimanapun, istilah "Jadid" mempertahankan nilainya sebagai suatu bentuk simbol, karena semua gerakan ini memang memegang ciri-ciri dasar tertentu yang sama, yaitu penolakan apa yang mereka pandang sebagai tambahan-tambahan irasional atas Islam yang tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an maupun Hadis yang sahih, dorongan untuk memodernisasi pendidikan Muslim, dan penolakan atas dominasi Barat. Dalam konteks Rusia, penolakan atas Barat berarti penggulingan absolutisme tsar, namun tujuan ini dimiliki juga oleh para revolusioner non-Muslim sehingga muncul jalan pembuka kerjasama dengan kaum sosialis dan kaum komunis. Keberhasilan Revolusi Oktober 1917 berarti bahwa kaum Jadid harus menentukan ke mana mereka berpihak: 1917, seperti dinyatakan Adeeb Khalid, merupakan "Momen Kebenaran"<sup>12</sup>. Kaum Bolshevik tidak berkuasa sebagai pihak yang mendukung dominasi Rusia atas Asia Tengah, tetapi sebaliknya, setidaknya di atas kertas, agar ada beberapa alasan bagi kaum Jadid untuk mendukung mereka. Namun pilihan tersebut tidak lahir seketika. Penggulingan pemerintahan sementara tidak disambut antusias di kalangan kaum Jadid, sejauh yang dapat kita nilai dari bukti yang ada. Suasana hati yang dominan waktu itu adalah netralitas. Seorang Bukharan muda, 'Abd al-Ra'uf Fitrat, menulis di *Hurriyat (Kebebasan)*:

“Merupakan hal yang ceroboh dan bodoh untuk memihak entah kepada Bolshevik atau lawan-lawan mereka. Kita tidak seharusnya menentang salah satu dari mereka sampai salah satu dari mereka memutuskan untuk merampas hak-hak nasional kita.”<sup>13</sup> Reaksi umat Muslim Soviet atas peristiwa Oktober tidaklah seragam; berbagai upaya dilakukan sepanjang 1917 untuk mencapai suatu pendekatan yang seragam, namun tak berhasil; setiap wilayah memiliki jalannya masing-masing. Ketika mereka dipersatukan kembali, hal ini terjadi di bawah negara Soviet, setelah akhir perang saudara.

Tidaklah mungkin memperkirakan berapa banyak kaum Jadid yang memutuskan untuk mendukung pemerintahan Bolshevik setelah Oktober 1917. Pada Juni 1918, Partai Komunis Turkistan didirikan, dan “kaum Jadid sesegera mungkin bergabung dalam jumlah besar ke dalamnya”. Koran Jadid, *Hurriyat*, menjadi organ orang-orang Soviet Samarkand. Pada musim panas 1918, Soviet Tashkent didominasi oleh para Jadid. Tashkent memiliki sejumlah “ulama kontra-revolusi” yang dipenjarakan, menunjukkan bahwa umat Muslim-nya terbelah dua.<sup>14</sup> *Fitrat*, yang tampak lebih ambivalen pada Oktober 1917, kini menerjunkan diri sepenuh hati ke dalam persoalan Bolshevik. Perhatian utamanya kini ialah melawan penjajahan Eropa. Pada 1919 ia menulis bahwa ‘para penjajah Eropa tak memberikan apa-apa kepada Timur kecuali kemaksiatan dan kehancuran. Bahkan walaupun mereka datang ke Timur dan mengatakan “Kami akan membuka sekolah-sekolah peradaban dan pendidikan-pendidikan tinggi untuk umat manusia”, mereka tidak membuka apa-apa kecuali rumah bordil dan tempat mabuk”.<sup>15</sup>

Seorang Tatar, Mir Said Sultan-Galiev, lahir di provinsi Ufa pada 1892, dulunya seorang wartawan tanpa keterlibatan politis tertentu sampai 1917, ketika ia menyambut peristiwa-peristiwa revolusioner yang menghancurkan kekaisaran Rusia sebagai suatu kesempatan besar. Bersama Mullah Nur Vahitov, ia mengembangkan suatu teori tentang “komunisme nasional Muslim”, yang berpandangan bahwa Marxisme harus diubah untuk menyesuaikan diri dengan watak khusus masyarakat Islam. Secara historis, kecenderungan ini bertahan dari tahun 1918 sampai 1928. Ini merupakan suatu sintesis dari berbagai ideologi, terkadang saling bertentangan, mencakup nasionalisme, komunisme, dan anarkisme, dan tentu saja agama. Kaum komunis nasional Muslim umumnya percaya bahwa jalan hidup Islami dan Marxisme secara definisi tidaklah bertentangan, tetapi dapat saling berdampingan dan bahkan saling melengkapi. Tujuan langsungnya ialah pendirian sebuah negara otonom di Asia Tengah yang akan diatur bukan oleh orang Rusia, tetapi oleh suatu partai Komunis Muslim. Walaupun partai tersebut akan menjadi komunis, ia tidak akan memperkenalkan sosialisme; dan revolusi sosial melawan kelas-kelas yang eksploitatif, termasuk para “ulama Muslim yang terbelakang”, akan ditunda jauh di masa mendatang.<sup>16</sup> Propaganda anti-religius, katanya, seharusnya dilakukan hanya di antara bangsa-bangsa Muslim Soviet Rusia yang paling maju – Tatar, Bashkir, dan Kazakh. Di Turkistan, Khiva, dan Bukhara, hal ini tidak disarankan, karena “rakyat ini belum mencapai tahap perkembangan yang telah dilewati oleh Tatar.”<sup>17</sup> Cepatnya kenaikan Sultan-Galiev ke posisi-posisi penting di dalam pemerintahan Bolshevik dan kejatuhannya secara tiba-tiba serta fitnah setelahnya dalam pembersihan Stalin telah menyediakan suatu metafor bagi beberapa generasi, mengenai janji dan kekecewaan atas kebijakan nasional Soviet.

Sultan-Galiev merupakan seorang pemikir dan pembicara publik handal. Ia melayani negara Soviet selama perang saudara, sebagai pimpinan Kolegium Militer

Muslim Pusat, pemimpin Biro Pusat Organisasi Komunis Rakyat Timur, dan anggota kolegium Komisariat Rakyat atas Urusan Nasional; posisi terakhir ini membuatnya menjadi orang dengan jabatan tertinggi yang berasal dari kaum Muslim dalam suatu badan tingkat-tinggi Uni Soviet. Sultan-Galiev memperjuangkan visinya selama beberapa tahun, namun berkali-kali kecewa karena ulah kaum Bolshevik di pusat. Ia secara khusus memperhatikan rencana-rencana Stalin bagi pemerintahan federal baru (USSR), yang, menurutnya, akan merugikan Tatar dan kelompok Muslim lainnya yang tidak diberikan status republik persatuan. Di akhir 1922, Sultan-Galiev telah berada dalam konflik langsung dengan kebijakan nasional Stalin, dan pada akhirnya, 1923, ia ditangkap. Walaupun segera dibebaskan, ia disingkirkan dari keanggotaan partai dan semua posisinya dalam administrasi Bolshevik. Juni, pada konferensi keempat Komite Pusat partai, ia dituduh Stalin melakukan konspirasi dan pengkhianatan.<sup>18</sup> Konferensi ini mengeluarkannya dari partai dan mengutuknya dengan apa yang digambarkan sebagai “penyimpangan Sultan-Galievisme” (*Sultangalievdhchina*). Setelah mengakui tuduhan kejahatan atasnya, secara mengejutkan, ia dibebaskan dan dibiarkan bekerja sebagai seorang wartawan sampai penangkapannya pada 1928. Mengikuti penangkapan ini, Sultan-Galiev disidang di 1930 bersama 76 lainnya sebagai bagian dari “organisasi kontra-revolusi Sultan-Galievis”. Hukuman kematiannya segera diringankan, dan ia dibebaskan pada 1934 dan dibolehkan untuk hidup di provinsi Saratov. Namun penangkapan ketiganya pada 1937 diikuti oleh eksekusi pada Januari 1940.

Jatuhnya Sultan-Galiev dari kekuasaan pada 1923 tentulah memiliki arti simbolik yang besar; ini berarti akhir dukungan resmi Soviet atas gagasan komunisme nasional. Tetapi, tidak ada bukti mengenai adanya pergeseran seketika menuju kebijakan anti-Muslim. Stalin sendiri menolak hal ini pada konferensi keempat yang disebutkan di atas. Dia menyerang “orang-orang kiri yang berpikir bahwa kita dapat mencangkokkan model-model Rusia kepada bangsa-bangsa yang berbeda, tanpa mempertimbangkan adat-istiadat dan kondisi lokal”.<sup>19</sup> Jadi, pada tahap ini, Jadid masih mungkin bekerja dalam sistem Soviet tanpa sepenuhnya meninggalkan keyakinan-keyakinan mereka. Beberapa malah memilih bergabung bersama para pemberontak Bamaschi, yang telah melawan Rusia dan pemerintah Soviet yang lebih akhir sejak 1916. Tetapi, setidaknya di Bukhara, mayoritas mereka (termasuk Fitrat) memilih jalur hukum karena mereka pikir dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan mereka di Republik Rakyat itu, yang nantinya akan menjadi bagian dari Uzbekistan.<sup>20</sup> Para komunis Muslim pribumi tetap mengendalikan aparat-aparat partai di wilayah lokal mereka pada 1920-an, mengupayakan kebijakan-kebijakan pembaruan dan reorganisasi segaris dengan arah yang dikeluarkan dari Moskow.<sup>21</sup> Ini adalah era *korenizatsiya* (pribumisasi).<sup>22</sup> Aturan-aturan radikal tahun 1918 (seperti nasionalisasi properti-properti wakaf<sup>23</sup> dan penghapusan pengadilan-pengadilan syariat) berhenti diberlakukan setelah 1922, walaupun tetap tercantum di dalam buku statuta. Hans Bräker menyimpulkan bahwa periode ini hingga 1927 adalah periode yang “relatif lunak” kepada Islam oleh negara Soviet.<sup>24</sup>

### **Kerjasama dengan Islam melawan Kolonialisme**

Tahun 1920-an adalah masa keemasan revolusi anti-imperialis bagi kaum Bolshevik. Kerjasama dengan Islam dapat dilakukan atas dasar upaya bersama untuk menggulingkan kekuatan Barat di dunia Muslim sekaligus mengubah masyarakat Muslim. Hal ini dimungkinkan karena Islam dapat ditafsirkan sedemikian rupa untuk menekankan

aspek revolusi sosialnya. Pada 7 Desember 1917, sesaat setelah memperoleh kekuasaan, kaum Bolshevik menerbitkan *Seruan atas Umat Muslim Timur yang Berjuang Keras*, yang meyakinkan mereka bahwa “keyakinan-keyakinanmu dan adat-istiadatmu, institusi-institusi nasional dan budayamu, adalah bebas dan tak dapat dilanggar”.<sup>25</sup>

Hubungan antara radikalisme Muslim anti-imperialis dan komunisme diungkapkan dan secara umum didukung oleh asas-asas dasar dan arahan umum dari Internasionale (Komunis) Ketiga. Komunis Internasional (Komintern) didirikan di Moskow pada 1919 untuk mengelola kegiatan partai-partai komunis luar negeri menurut arahan Partai Komunis Rusia. Pada waktu itu, Lenin percaya bahwa lingkungan revolusioner yang dihasilkan oleh kekacauan menyusul Perang Dunia I memerlukan organisasi komunis internasional yang sepenuhnya baru, yang akan menumbuhkan solidaritas kelas-pekerja dan revolusi dunia melawan para penguasa kapitalis Barat. Pusat Komintern didirikan di Moskow, karena tampak alami bahwa ia ditempatkan di satu-satunya negeri sosialis yang ada waktu itu.

Struktur Komintern mengikuti Partai Komunis Rusia, bukan karena ada suatu rancangan jahat untuk menegaskan dominasi Rusia, tetapi sekadar lantaran partai Rusia adalah satu-satunya partai yang telah berhasil menyelesaikan suatu revolusi. Namun, pada 1920 Partai ini menundukkan semua partai komunis luar negeri di bawah Moskow dengan membebankan 21 syarat bergabung. Para komunis diperintah untuk membuat propaganda dalam pasukan-pasukan bersenjata di negeri mereka sendiri, membuat upaya-upaya tertentu untuk memenangkan dukungan para petani, dan mencapai emansipasi bagi bangsa-bangsa yang tertindas dan orang-orang yang dijajah. Mereka didorong untuk menyingkirkan para reformis dan sentris dari semua posisi dalam gerakan kelas-pekerja, dan menggantikannya dengan para komunis, mengutuk pasifisme, menerima semua keputusan dari Komintern sebagai yang mengikat, mengambil nama “Partai Komunis”, dan memecat semua anggota yang menolak menerima 21 syarat pada kongres yang diselenggarakan dengan tujuan menerapkan syarat-syarat tersebut. Partai-partai Komunis juga diharuskan untuk menata organisasi mereka atas prinsip “sentralisme demokratis”, dan mendukung tanpa ragu-ragu kepentingan-kepentingan dari “setiap republik Soviet”.

Suka atau tak suka, partai-partai komunis muncul di negeri-negeri asing sebagai sekutu ideologis dan instrumen kebijakan asing dari Uni Soviet. Komintern, dalam suatu keberangkatan yang radikal dari preseden-preseden yang dicanangkan baik oleh Internasionale Pertama maupun Kedua, tidak lagi merupakan suatu rangkaian partai-partai nasional, tetapi bertindak lebih sebagai suatu partai komunis tunggal dengan cabang-cabang di negara-negara yang berbeda. Di antara kongres-kongres, kekuasaan tertinggi adalah Komite Eksekutif Komintern, yang nantinya memiliki kekuatan setara dengan, dan menggantikan, komite-komite sentral dari masing-masing partai-partai, yang akan memungkinkannya menjadi pusat arahan bagi revolusi dunia.

Pada awalnya, Komintern secara umum merupakan suatu organisasi yang berkiblat ke Barat. Jumlah cukup banyak dari hasil rekrutannya datang dari negeri-negeri Barat, dan ini memperkuat kepercayaan bahwa revolusi dunia di negeri-negeri Barat yang terindustrialisasi sedang dekat. Kaum Bolshevik dulunya yakin bahwa revolusi proletar sedang berjalan di seluruh Eropa dan menyapu segala yang ada di depannya. Tetapi pada

musim gugur 1920, para pemimpin Soviet mulai takut bahwa revolusi di Barat mungkin sama sekali tidak akan datang. Kegagalan di Jerman dan Hungaria, dan terbentuknya suatu ikatan kokoh rezim anti-komunisme antara Uni Soviet dan Kekuatan-Kekuatan Sentral yang kalah, menyebabkan mereka mempertimbangkan ulang analisis mereka. Sementara hal ini tidak mengarahkan mereka untuk meninggalkan gagasan revolusi dunia yang sedang menjelang di Barat, hal ini mengalihkan perhatian mereka untuk mempertimbangkan potensi revolusioner yang mungkin ditawarkan Timur.

Lenin sangat memperhatikan Asia, dan ketika harapan revolusi di Barat memudar setelah perang dengan Polandia pada Oktober 1920, ia memalingkan perhatiannya ke jajahan-jajahan kekuatan Barat. Dalam diri mereka, ia melihat suatu cara memanfaatkan revolusi-revolusi nasionalis-borjuis untuk merampas bahan-bahan mentah dan pasar-pasar dari kekuatan-kekuatan penjajah, yang ia percaya niscaya bagi kelangsungan hidup kekuatan penjajah. Dalam hampir semua komunikasi dan laporan tahun 1920, ia jelas-jelas merujuk ke Asia, menyebutkan bahwa "salah satu alasan utama yang mencegah gerakan kelas pekerja revolusioner di negeri-negeri kapitalis yang maju ialah fakta bahwa, berkat kepemilikan kolonial dan keuntungan super mereka yang diperoleh oleh modal keuangan, para kapitalis dari negeri-negeri ini telah mampu menciptakan suatu aristokrasi kerja yang relatif lebih besar dan stabil".<sup>26</sup> Jika Eropa mengecewakan kaum Bolshevik, Asia dapat menghidupkan kembali semangat mereka yang melemah. Para pemimpin Bolshevik memutuskan bahwa dunia kapitalis harus dihancurkan dengan kekalahan koloni-koloninya, sebelum komunisme dapat berhasil di Barat, dengan beralasan bahwa revolusi di Timur dan kehancuran sistem kontrol penjajahan seharusnya dapat mendahului revolusi di Barat. Ini merupakan elemen kunci dalam perjuangan revolusioner, karena "sekitar 70 persen dari populasi dunia termasuk dalam bangsa-bangsa yang ditindas, baik dalam suatu negara yang dijajah langsung atau setengah-dijajah, seperti Persia, Turki dan China".<sup>27</sup> Pada kongres Komintern II pada 1920, Lenin secara resmi memperkenalkan suatu arah Ketimuran yang baru, yang terkenal sebagai "Kebijakan Timur Soviet". Lenin melangkah jauh menyatakan bahwa dengan bantuan dan propaganda Soviet, Asia akan mungkin melangkahi tahap kapitalis dan bergerak menuju sosialisme sebelum revolusi Eropa.

Haruslah diingat bahwa Barat hidup dari Timur; kekuatan-kekuatan penjajah Eropa bertambah kaya utamanya dengan merampas dari jajahan-jajahan di timur, tetapi di saat yang sama, mereka mempersenjatai jajahan-jajahan mereka dan mengajari mereka untuk bertarung, dan dengan melakukannya Barat sedang menggali kuburnya sendiri di Timur.<sup>28</sup>

Walaupun kebijakan luar negeri Soviet tak pernah sepenuhnya mengambil orientasi Timur ataupun Barat, setelah 1920 meningkat minat kepada prospek-prospek revolusioner Timur dan suatu pergeseran yang jelas dan nyaris konsisten menuju kecenderungan politik ke Timur.

Sebagai bagian dari strategi Komintern, para komunis pro-Soviet menawarkan solidaritas dengan gerakan-gerakan nasional anti-imperialisme di Timur. Bagi kaum Bolshevik, revolusi Oktober telah membangun sebuah jembatan antara Barat "yang tercerahkan" dan Timur yang "diperbudak", yang menyediakan landasan bagi seruan para pemimpin Soviet kepada rakyat-rakyat terjajah pada Kongres Rakyat Timur yang disponsori Komintern di Baku, Azerbaijan, pada September 1920. Sesudah itu, Komintern

mendirikan Dewan Propaganda dan Aksi Rakyat Timur yang bermarkas di Baku. Sebagai akibatnya, banyak jaringan dibuat oleh kaum Bolshevik dengan rakyat Muslim Timur, dan banyak pejuang revolusioner Asia dilatih di Uni Soviet, yang semuanya memiliki konsekuensi-konsekuensi besar untuk Barat.<sup>29</sup>

Pada tahun-tahun setelah 1920, Bolshevik mencoba memperkuat jembatan ini dengan menyarankan adanya sebuah front persatuan antara para komunis dan para nasionalis Timur melawan imperialisme Barat. Dalam melakukan hal ini, pemerintahan Soviet menerapkan suatu strategi multiaspek mengenai kebijakan-kebijakan alternatif bersamaan, yang seketika memadukan “koeksistensi yang damai” dan “bantuan persaudaraan” bagi partai-partai dan gerakan-gerakan komunis dengan kerjasama dan bantuan bagi pemerintahan nasionalis reaksioner yang menekan partai-partai dan gerakan-gerakan tersebut.

Strategi fleksibel ini memungkinkan Uni Soviet memasuki negeri-negeri sasaran untuk memperbesar “tujuan” dan pengaruhnya. Ia juga memperbolehkan penggunaan segala macam cara yang tersedia – partai-partai komunis, organisasi-organisasi internasional, dan bahkan terkadang partai-partai reaksioner. Pada akhirnya, faktor yang menentukan bagi Uni Soviet tidaklah mesti keberhasilan partai komunis tertentu, tetapi lebih pada capaian tujuan-tujuan kebijakan luar negeri dari Uni Soviet. Komunisme Dunia secara publik tetap dinyatakan, sebagai tujuan tertinggi jangka panjang, tetapi selalu sekunder bagi tujuan langsung untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan negara Soviet.

### ***Kongres Rakyat Timur di Baku***

Antara 1 dan 7 September 1920, Kongres Rakyat Timur Pertama diadakan di Baku, ibukota Soviet Azerbaijan. Sekitar 2000 perwakilan dari lebih 20 rakyat Asia berkumpul di sana, untuk membahas dan menentukan, bersama-sama para pemimpin dan perwakilan Bolshevik dari proletariat Barat, sebuah strategi bersama melawan penjajahan dan menuju revolusi dunia. Kongres Baku merupakan suatu peristiwa penting dari periode revolusioner yang dibuka oleh revolusi Oktober. Sekali lagi, ia menekankan, untuk revolusi nasional dan anti-kolonial, keniscayaan sebuah strategi “revolusi ganda” (termasuk peneguhan kembali peran kepemimpinan kelas pekerja) sebagai landasan yang akan menyatukan perjuangan-perjuangan para rakyat dari Timur dengan para proletar di Barat.

Kongres Rakyat Timur memberikan banyak perhatian pada Inggris. Seruan untuk kongres datang dari Komintern dan pertama kali diumumkan di *Izvestiya* pada 3 Juli; seruan itu secara khusus ditujukan kepada “rakyat-rakyat yang diperbudak di Persia, Armenia, dan Turki”. Rakyat Turki diseru untuk melawan kekuatan-kekuatan Sekutu yang mengendalikan Konstantinopel dan Anatolia Barat.

Para Petani Anatolia! Pemerintahan Inggris, Italia dan Prancis telah merebut Konstantinopel dengan desingan peluru mereka; mereka memenjarakan Sultan, memaksanya untuk menyetujui pengambilan wilayah yang murni milik Turki, dan menyerahkan keuangan Turki kepada para pemodal asing dalam rangka memfasilitasi serangan terhadap rakyat Turki yang dimiskinkan oleh perang selama enam tahun.



Para petani Anatolia! Kalian benar-benar dipanggil untuk memengaruhi Kemal-Pasha, dalam rangka melawan penjajahan asing; tetapi pada waktu yang sama, kami tahu bahwa kalian sedang berupaya membentuk partai nasionalmu sendiri, partai petanimu sendiri, yang akan memungkinkanmu melanjutkan perlawanan pada peristiwa ketika Pasha harus melanjutkan perdamaian dengan para Sekutu pemangsa.<sup>30</sup>

Ordzhonikidze dan Zinoviev dipilih Lenin sebagai organisator utama kongres, dibantu para Bolshevik yang telah berpengalaman dengan urusan-urusan Timur. Demikianlah, Anastas Mikoyan, Nariman Narimanov, dan Mir Said Sultan-Galiev membentuk "Orgburo", yang menetapkan aturan-aturan keikutsertaan bagi para delegasi.<sup>31</sup>

Tidak semua komunis senang dengan penyelenggaraan kongres Muslim yang bertujuan meningkatkan kehormatan Bolshevisme di antara rakyat Timur. Komunis Bengali ternama, M.N. Roy, dalam memoarnya yang diterbitkan di India setelah kematiannya, menjelaskan bahwa ia menentang gagasan kongres Baku. Roy berdebat dengan para pemimpin Bolshevik bahwa hal ini sekadar berguna sebagai jalan agitasi, yang pada dasarnya tak cukup untuk membangkitkan suatu revolusi di Timur. Kenangnya dalam memoar:

Lenin tersenyum kecil atas kekeraskepalaanku; Zinoviev marah kepada keberanian seorang yang lancang melawan kehendaknya. Radek mengejek keseriusanku yang kekanak-kanakkan. Mungkin ini tak akan bertahan lama, tapi mengapa menyia-nyaiakan kesenangan suatu pertunjukan indah yang pastinya akan membuat Sekretaris Luar negeri Inggris, Lord Curzon, tidak tidur nyenyak.<sup>32</sup>

Para petinggi kepemimpinan Bolshevik pasti sejalan dengan pandangan humoris Radek, dan izin resmi diberikan kepada kongres yang dibuka pada 1 September 1920.<sup>33</sup> 1891 perwakilan hadir.<sup>34</sup> Dari perwakilan ini, 1273 dikabarkan komunis, 226 non-partai; wanita hanya ada 55 orang. Warga Turki merupakan kelompok nasional terbesar dengan 235 utusan; mereka ditambah dengan 192 warga Persia, 157 Armenia, dan 100 utusan Georgia yang secara khusus diundang oleh Komintern; ada juga 8 orang China, 8 Kurdi, dan 3 Arab.<sup>35</sup>

Tujuan inti kongres ini, dinyatakan, adalah mengawali suatu *platform* anti-imperialis di kalangan bangsa-bangsa Timur.<sup>36</sup> Pentingnya dukungan kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional seperti yang dilakukan Mustafa Kemal dinyatakan berkali-kali dalam *platform* tersebut. Menarik bahwa semangat front persatuan melawan "belunggu imperialis asing" lebih jauh diperkuat dengan pernyataan tokoh pengasingan Enver Pasha dan sebuah pidato antusias yang diberikan oleh perwakilan resmi pemerintahan Ankara.<sup>37</sup>

Kongres Baku pada prinsipnya menyetujui penerbitan "*Seruan kepada Rakyat Timur*", suatu dokumen yang jelas ditulis untuk digunakan sebagai alat propaganda di seluruh dunia Muslim. Propaganda ini diarahkan sepenuhnya melawan Inggris, kekuatan yang dianggap Komintern sebagai salah satu kekaisaran besar yang muncul dari Perang Dunia I dengan kekuatan dan niatan untuk mendominasi rakyat-rakyat "tertindas" di Timur.<sup>38</sup>

Agitasi anti-Inggris naik hingga tingkat tertingginya pada pertemuan terakhir kongres rakyat timur di Baku, ketika 26 *komissar*\* Baku yang dibunuh dua tahun sebelumnya dipuji sebagai korban imperialisme Inggris. Sebuah upacara pemakaman diorganisir hari itu dengan kerjasama dari semua utusan bersama dengan keluarga dari 26 *komissar* yang dibunuh.<sup>39</sup> Tokoh-tokoh partai dan negara dari Azerbaijan, utusan-utusan kongres dan perwakilan-perwakilan dari Komintern menyampaikan pidato-pidato anti-Inggris untuk mengenang para *komissar*.<sup>40</sup>

Pada kongres Baku, beberapa pembicara menekankan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan Komunisme. Anatolii Skachko dari komisariat rakyat untuk kebangsaan, contohnya, menyatakan bahwa “agama umat Muslim berakar pada prinsip-prinsip komunisme religius, di mana tak boleh ada manusia yang menjadi budak orang lain, dan tak boleh ada sepotong tanah pun yang boleh dimiliki secara pribadi”.<sup>41</sup> Zinoviev menyampaikan sebuah seruan berapi-api bagi ‘rakyat Timur untuk melakukan “jihad terutama melawan penjajahan Inggris”’.<sup>42</sup>

Keputusan komunis untuk mengupayakan suatu kerjasama dengan kaum Muslim hanya merupakan langkah pertama. Keberhasilan atau kegagalannya ditentukan sebagian oleh sikap kaum komunis. Beberapa hambatan diciptakan, yang sebenarnya tak perlu dilakukan, oleh kaum Bolshevik sendiri. “Tesis tentang Problem-problem Nasional dan Kolonial” Lenin, yang diadopsi dengan sedikit perubahan pada Kongres Komintern II pada 1920, mengandung bagian-bagian, seperti di bawah ini, yang akan dapat mencegah umat Muslim untuk memberikan dukungan mereka: “Adalah wajib untuk berjuang melawan Pan-Islamisme dan kecenderungan-kecenderungan sejenis yang berupaya memadukan perjuangan pembebasan dengan penguatan posisi para *khan*, para tuan tanah, para *mullah*, dan lain-lain.”<sup>43</sup> Begitu pula Zinoviev, di samping seruannya untuk “jihad”, menjelaskan “dengan jujur” dalam kongres Baku bahwa “Pan-Islamisme dan Mohammedenisme\*\* dan segala kecenderungan seperti itu tidaklah segaris dengan kita. Kita memiliki kebijakan yang sangat berbeda”. Hal ini benar, namun tidak diplomatis. Seorang komunis Indonesia, Tan Malaka, menyatakan pada 1922 di Kongres Komintern IV bahwa banyak kerusakan telah dibuat akibat serangan-serangan Komintern terhadap Pan-Islamisme.<sup>44</sup>

Seperti dicatat di atas, sikap-sikap resmi kepada Islam dan umat Muslim umumnya fleksibel dan dapat didamaikan dalam periode antara konsolidasi kekuatan Bolshevik dan tahun 1927. Dengan perjuangan pahit tahun 1920-1921 yang masih membekas dalam ingatan mereka, kaum Bolshevik tidak dapat terus berlawanan dengan rakyat Muslim Uni Soviet. Lingkungan sosio-ekonomi yang ada juga lebih sesuai untuk melanjutkan pendekatan moderat kepada umat Muslim. Awal 1920-an merupakan masa Kebijakan Ekonomi Baru (KEB), yang berdasarkan kompromi dan tidak memicu kekacauan nasional atau politis yang serius di dalam negeri. Karena kebanyakan Muslim di Uni Soviet terdiri dari suatu proporsi yang tinggi – agak tak lazim – dari para petani, KEB pro-petani efektif bekerja sesuai keinginan umat Muslim.

---

\* *Komissar*, pengurus dalam suatu pos pemerintahan komunis dengan tugas-tugasnya yang spesifik, seperti melakukan pendidikan politik, pengawasan atas musuh, dan lain-lain.

\*\* *Mohammedanism*, kosakata dari era Orientalisme klasik untuk menyebut “Islam”, yang digunakan oleh orang Barat lama untuk menyebut para pengikut Nabi Muhammad SAW.

Aliansi anti-kolonialis juga tergantung pada kesiapan gerakan-gerakan perlawanan Muslim (atau pemerintahan-pemerintahan Muslim, ketika sejalan) untuk menerima jabat tangan persahabatan. Di sini ada suatu gambaran yang berbeda-beda. Tentu ada banyak bukti bahwa para pemikir Muslim pada prinsipnya menyepakati tujuan-tujuan komunis. Di Indonesia, contohnya, Hadji Mohammad Misbach sangat aktif di pertengahan 1920-an dalam mengembangkan dan menyebarkan gagasan kerjasama antara komunisme dan Islam. Artikelnya mengenai "Islamisme dan Komunisme" tahun 1925 menggambarkan dengan keyakinan mutlak bahwa keduanya identik:

Semua teman kita yang mengaku diri mereka komunis tetapi masih suka mengungkapkan pendapat yang bertujuan untuk menghancurkan agama Islam bukanlah komunis sejati, atau mereka belum memahami posisi komunis. Sebaliknya, mereka yang mengaku Islam tetapi menolak Komunisme, Saya tidak takut mengatakan bahwa mereka bukanlah Muslim sejati, atau mereka belum memahami secara benar posisi agama Islam.

Alasan utama hal ini, katanya, adalah bahwa kapitalisme tetaplah merupakan usaha Setan untuk menggoda orang beriman agar jauh dari Tuhan. "Mereka yang tersesat adalah mereka yang hanya ingin mendapatkan makanan atau keuntungan, tanpa mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah."<sup>45</sup> Misbach tak sendirian. Pemberontakan komunis 1926 di Jawa dan Sumatra dipimpin oleh para ulama yang mendakwahkan revolusi melawan dua iblis: "Kapitalisme yang mengajarkan ketamakan dan menjauhkan dari Tuhan, dan imperialisme yang mengancam dunia Islam."<sup>46</sup> Di Mesir, pemimpin modernis Muslim, Syekh Muhammad Rashid Ridha sewaktu-waktu menyuarakan sentimen pro-Bolshevik: "Bolshevisme hanyalah nama lain untuk sosialisme. Umat Muslim harus mengharapkan keberhasilannya, karena mereka juga merupakan para pekerja dan menderita penindasan yang sama." Namun ia menambahkan keberatan, bahwa "komunisme tidak sesuai dengan hukum Islam."<sup>47</sup> Di Soviet Rusia, intelektual dan komunis Tatar, Hanafi Muzaffar, menulis dengan optimis pada 1922, "Segala kondisi mewajibkan umat Muslim untuk bergabung ke dalam komunisme". Teolog Jadidiah, Musa Jarullah Bigi, maju dengan gagasan serupa: "Suatu revolusi besar telah dimenangkan di Rusia, melahirkan suatu rezim adil dan setara. Umat Muslim menikmati kesetaraan, keamanan, dan kedamaian," tulisnya pada 1925.<sup>48</sup>

Tetapi ada sisi lain dari hal ini. Persetujuan atas tujuan-tujuan sosial komunis (atau sosialis) sering kali berjalan berdampingan dengan penolakan atas sosialisme atau komunisme sebagai ideologi-ideologi sekuler yang diajukan oleh kaum kafir untuk kepentingannya sendiri, dan terlepas dari itu, langkah-langkah tertentu yang menurut kaum komunis harus dicapai – seperti perampasan properti-properti wakaf atau kebijakan mengubah pakaian dan keadaan wanita – dapat digambarkan sebagai serangan terhadap Islam. Dalam hal ini, kisah Indonesia cukup mencerahkan. Dahulu, awalnya terdapat kerjasama antara kaum komunis dan kaum Muslim modernis di Sarekat Islam (SI), pergerakan massa yang didirikan pada 1912 untuk membela orang Indonesia dari dominasi dagang orang China, dari penyebaran pengaruh agama misionaris Kristen, dan dari aturan politik Belanda.<sup>49</sup> Kerjasama ini bertahan sampai Oktober 1921, ketika kelompok Yogyakarta di SI mengambil alih kendali partai di satu kongres khusus yang memecat PKI (saat itu, Perhimpunan Komunis Hindia-Belanda)<sup>50</sup> dari badan utama. Cabang yang dipecat dari SI (menurut Tan Malaka, mencakup 30.000 dari 100.000 anggota SI)<sup>51</sup> kemudian menamakan diri "SI Merah" dan menyatakan diri lebih terbuka sebagai

kaum komunis. Mulai saat itulah mencuat konflik dengan Islam modernis. Seperti ditulis Leslie Palmier, "Perjuangan melawan PKI dalam Sarekat Islam dipimpin oleh kaum modernis religius yang berpusat di Yogyakarta".<sup>52</sup> Hal ini tampak sebagai paradoks: umat Muslim yang lebih tradisional dan berasal dari daerah pedesaan Jawa mampu bekerjasama dengan kaum komunis, sementara gerakan-gerakan Muslim modernis di perkotaan melihat PKI sebagai sebuah kekuatan saingan.

Pada waktu yang sama, di bagian lain dunia, di Asia Tengah, kaum Muslim tradisional-lah yang menentang komunisme, sementara setidaknya satu bagian dari kaum modernis (gerakan Jadid) bergabung dengan Bolshevik dan melanjutkan kerjasama sampai akhir 1920-an. Ada dua alasan bagi perbedaan pendekatan ini. Tradisionalisme umat Muslim *abangan* di Jawa tidaklah berakar pada Al-Qur'an, melainkan ritual-ritual lokal. Faktanya, lawan-lawan mereka menyangkal bahwa mereka benar-benar Muslim. Di samping itu, banyak kota merupakan menjadi pusat perkembangan ekonomi yang terinspirasi penjajahan Barat, dan umat Muslim *santri* kota -- yang lebih ortodoks -- cenderung lebih beruntung dibandingkan sejawat mereka di pedesaan. Jadi, dalam hal ini, "tradisionalisme" tidak menandakan warisan kekuasaan dan kekayaan, justru sebaliknya. Sebaliknya dalam kasus Asia Tengah, lawan Jadidiah adalah para penguasa tradisional, baik spiritual maupun sekuler, dari negara yang kurang berkembang dan semi-feodal, dan masyarakat berbasis-suku di Kaukasus Utara. Jadidiah sendiri merupakan sebuah upaya kaum intelektual yang memiliki audiens di pusat-pusat kota yang sebagian telah terbaratkan di Rusia Eropa.

### **Melawan Penjajahan tanpa Sekutu**

Beberapa tahun setelah kematian Lenin, partai Bolshevik dan Komintern yang telah ter-Stalinisasi meninggalkan pendekatan yang ramah kepada umat Muslim dari tahun-tahun awal revolusi. Kerjasama dengan Islam menjadi tidak mungkin karena alasan-alasan internal dan kebijakan luar negeri. Namun, perubahan ini agaknya terjadi bertahap. Ada berbagai tanda-tanda bahaya menuju akhir 1920-an, perihal mengerasnya posisi Bolshevisme terhadap Islam. Hal ini, contohnya, tampak dalam ranah budaya. Gerakan untuk melarang penggunaan aksara Arab, yang digunakan sebagai aksara semua bahasa umat Muslim Turki di Uni Soviet tahun 1920-an, setidaknya secara tersirat mengarah kepada budaya-budaya dan tradisi-tradisi Islam. Hal ini diakui oleh A.K. Abolin, seorang anggota resmi Soviet yang menolak usulan ini pada 1926: "Kita tak boleh mengumumkan tujuan (Latinisasi) ini di Kongres Turkologis Baku, juga kita tak boleh membiarkannya terwujud." Umat Muslim yang taat akan melihatnya dengan penuh permusuhan, dan "kita tidak boleh memberikan rakyat suatu alasan untuk menentang kekuasaan pusat karena pemaksaan suatu aksara baru bagi rakyat Timur."<sup>53</sup> Muncul "perlawanan serentak dan tak dapat diredam atas pengenalan aksara Latin dari hampir semua perwakilan rakyat Turki" pada 1926. Dukungan hanya datang dari orang-orang Turk, Azerbaijan, dan Bashkir.<sup>54</sup> Perlu ditambahkan pula bahwa orang-orang yang mendukung Latinisasi tidak setuju bahwa mereka sedang menghancurkan budaya Islam. Mereka lebih memilih berpendapat bahwa aksara Arab "menumpulkan kemampuan analitis anak-anak" karena membuat mereka lebih sulit melek huruf.<sup>55</sup> Terlepas perlawanan tersebut, Latinisasi tetap dijalankan dan diteruskan dari 1927 ke masa-masa berikutnya. Tahun 1927 tampaknya menjadi titik balik bagi umat Muslim Soviet dalam banyak hal.

Pada 1926, Liga Militer Anti-Tuhan menuntut penguatan propaganda anti-agama, dan Zhenotdel (sayap wanita Partai Komunis) berkampanye untuk membuka kerudung para wanita di Asia Tengah sebagai langkah awal mengakhiri apa yang dipandang kaum komunis sebagai penindasan terhadap wanita. Kampanye ini juga dimulai pada 1927 dan diberi nama *hujum* ("serangan"). Para pemimpin partai lokal di Tashkent (ibukota Uzbekistan) sangat tidak nyaman perihal arahan pusat ini. Mereka mengeluh bahwa mereka bahkan tidak dapat membujuk istri-istri mereka untuk tidak berkerudung di muka umum. Namun, mereka tetap harus meneruskan kampanye tersebut.<sup>56</sup> Kerudung (*parandja*) dilihat oleh rakyat lokal sebagai suatu kewajiban agama dan lambang kesetiaan kepada komunitas. Oleh karena itu, upaya para aktivis perempuan Partai untuk melaksanakan perintah ini "menyulut badai kekerasan yang menyerang para wanita" – untuk menggunakan ungkapan Shoshana Keller yang menggugah.<sup>57</sup> Kampanye membuka kerudung merupakan bagian dari serangan yang lebih umum atas Islam, termasuk penggantian dan pemecatan banyak pengurus Partai dari kalangan Muslim, serta tekanan atas banyak lembaga agama, seperti madrasah-madrasah, pengadilan-pengadilan Islam, masjid-masjid, dan wakaf-wakaf, yang semuanya sudah dijadwalkan untuk dilenyapkan.<sup>58</sup> Keller memperkirakan bahwa di Uzbekistan, sekitar 70 persen (dalam hitungan kasar) ulama Muslim (14.000 dari 20.000 orang) ditangkap, dibunuh, atau dilarang menjalankan tugas mereka antara 1927 dan 1939.<sup>59</sup> Banyak masjid ditutup. Namun tidak berarti bahwa kaum mukmin tidak boleh memiliki tempat ibadah. Aturan 8 April 1929 tentang perhimpunan keagamaan di Republik Rusia (RSFSR) tidak melarang kelompok-kelompok agama, tetapi menempatkan mereka di bawah kontrol ketat pemerintah. Menurut artikel 36, masjid hanya dapat ditutup "jika penutupan tersebut tidak menghilangkan kemampuan orang-orang beriman untuk menjalankan ibadah mereka". Kampanye melawan Islam dihentikan tahun 1930, dan tak pernah dilanjutkan kembali dengan serius.<sup>60</sup> Hal ini digantikan dengan prioritas yang lebih mendesak mengenai kolektivisasi dan industrialisasi. Karenanya, Islam terus menjadi agama yang "ada di mana-mana, hanya saja nyaris tak terlihat."<sup>61</sup>

Kampanye pembukaan kerudung hanyalah salah satu bagian dari "perubahan besar" menyeluruh yang dijalankan di bawah Stalin. Ketika Stalin muncul pada 1928 sebagai pemimpin tak terbantahkan dari Partai Komunis Uni Soviet, sebuah serangan keras dimulai untuk melawan musuh-musuhnya, baik musuh nyata maupun musuh bayangan, yang ada di dalam partai dan hierarki Soviet yang lebih luas, serta masyarakat secara keseluruhan. Ribuan orang disidang dan dibunuh, sementara yang lain menghilang begitu saja. Selama periode ini, pemerintah Soviet memulai Rusifikasi (Rusianisasi) Partai Komunis di wilayah-wilayah Muslim. Banyak pemimpin Muslim lokal dipenjarakan dengan alasan "penyimpangan nasional". Penangkapan kedua Sultan-Galiev dan persidangannya pada 1928 menandai dimulainya kampanye di semua wilayah Muslim di Uni Soviet – diikuti pembersihan massal atas berbagai institusi budaya, ilmiah, artistik, dan kesusastraan.<sup>62</sup> Banyak komunis Muslim benar-benar difitnah sebagai "penyimpang", "pengkhianat", "agen-agen provokasi", "desertir", "borjuis nasionalis", "musuh rakyat", dan anggota "lingkaran Bukharinis-Trotskyis". Pembersihan ini melenyapkan nyaris semua kader Muslim.<sup>63</sup>

Di luar Uni Soviet, Komintern tahun 1928 berpaling kepada kebijakan "kelas lawan kelas", seperti diumumkan pada Kongres Komintern VI, menandakan berakhirnya

kerjasama dengan gerakan anti-imperialis dari kalangan borjuis di mana saja dan suatu gerak menuju ketertutupan komunisme. Sebagaimana dicatat dalam *“Tesis-tesis mengenai Gerakan Revolusioner di Negeri-negeri Kolonial atau Semi-Kolonial”* terbitan Komintern, “Partai-partai komunis di negeri-negeri ini sejak awal haruslah membedakan diri mereka dalam praktik dan watak yang kentara, baik secara politik atau organisasi, daripada semua kelompok dan partai borjuis-kecil”. Namun demikian, “kerjasama dengan gerakan revolusioner nasional sementara diperbolehkan, asalkan ini gerakan revolusioner sejati dan para perwakilan gerakan itu tidak meletakkan hambatan bagi jalan para komunis”.<sup>64</sup> Lebih jauh, ketika Otto Kuusinen menyajikan laporannya mengenai negeri-negeri jajahan di dalam kongres, ia menolak “pembentukan segala jenis blok antara partai komunis dan kekuatan oposisi reformis-nasional”.<sup>65</sup> Dengan kata lain, kaum komunis menjauh dari partai-partai borjuis nasional dan borjuis-kecil. Hanya proletariat-lah yang dapat memimpin para petani dalam perjuangan revolusi borjuis-demokratik, dan karena (dalam pandangan Komintern) proletariat nyaris (selalu) ada di hampir semua negeri jajahan (kecuali India), tugas ini harus dilaksanakan oleh Partai Komunis sendiri, apapun komposisi sosialnya. Kebijakan pengasingan ini berjalan seiring tekad untuk menghadapi ideologi feodal maupun borjuis. Sejak saat inilah, di Iraq, Partai Komunis yang baru dibentuk mengawali kampanye anti-religius pada 1929, termasuk seruan untuk “membebaskan wanita Arab dari rantai kemunduran dan kebodohan.”<sup>66</sup>

### **Front Rakyat Berubah Wajah**

Perubahan situasi dunia – terutama kemenangan Nazi di Jerman – memaksakan suatu perubahan dalam kebijakan komunis. Seperti yang biasa terjadi pada Komintern, perubahan ini diterapkan lintas negara pula. Front Rakyat lahir tahun 1925 sebagai hasil Kongres Komintern Ketujuh yang diadakan pada tahun tersebut. Kongres ketujuh mengubah strategi komunis. Ketimbang bertindak sendiri, partai-partai komunis diperintah untuk “menciptakan front rakyat anti-imperialis” dan juga “turut andil aktif dalam gerakan-gerakan massa anti-imperialis yang dipimpin oleh para reformis-nasional dan berupaya melakukan aksi bersama dengan organisasi-organisasi revolusioner-nasional dan reformis-nasional.”<sup>67</sup> Sekali lagi, kerjasama dengan kekuatan anti-imperialis dan kekuatan Muslim menjadi mungkin. Tetapi, perlu dicatat bahwa kerjasama ini semata-mata berada di bawah tujuan melawan fasisme, dan karena sejumlah kekuatan imperialis (seperti Inggris, Prancis, dan Belanda) merupakan sekutu dalam pertarungan ini, anti-imperialisme diterima hanya dalam batasan tertentu. Hak rakyat jajahan untuk menentukan diri sendiri tetaplah absah, catat Maurice Thorez, pemimpin Partai Komunis Prancis, tetapi untuk saat ini mereka tidak seharusnya menuntut kemerdekaan, karena dalam perjuangan melawan fasisme, “kepentingan rakyat jajahan terletak dalam persatuan mereka dengan rakyat Prancis, bukan dalam sikap yang akan mendukung berjalannya fasisme” di wilayah seperti Afrika Utara atau Indochina.<sup>68</sup>

Front Rakyat bertahan sampai Agustus 1939 ketika Pakta Nazi-Soviet ditandatangani, dan garis kebijakan Komintern kemudian berubah lagi. Kata “fasisme” sementara dihilangkan dari kosakata Internasionale Ketiga. Di Timur Tengah, periode antara 1939 dan 1941 ini tidak cukup lama, atau cukup berarti untuk membuat perbedaan. Secara umum, bagi partai-partai komunis Timur, perubahan dari anti-fasisme ke netralitas, dalam apa yang sekarang digambarkan sebagai “Perang Imperialis Kedua”, kurang menimbulkan trauma dibandingkan dengan yang terjadi di Barat. Anti-imperialisme

sudah selalu merupakan kebijakan utama program parta-partai komunis Timur, dan peristiwa-peristiwa tahun 1939 tidak memerlukan perubahan untuk hal ini.<sup>69</sup> *Toh* faktanya, di India, Partai Komunis mengambil keuntungan dari garis kebijakan baru dengan meninggalkan posisi sebelumnya, yaitu kebijakan menyeru umat Muslim untuk bergabung ke dalam Kongres Nasional India. Sebaliknya, hal ini “menurunkan Kongres ke posisi yang sama dengan Liga Muslim”, menuntut Kongres untuk menyetujui tuntutan Liga Muslim atas pembagian negeri menjadi dua negara berdaulat.<sup>70</sup>

Serangan Hitler atas Uni Soviet pada Juni 1941 dengan cepat membuka jalan bagi kembalinya kerjasama dengan demokrasi borjuis, di bawah nama baru “Front Nasional”. Partai-partai komunis dunia pun mengambil garis kebijakan baru. Namun, ada beberapa permasalahan taktis yang patut dipertimbangkan di wilayah ini, karena kerjasama dengan Barat dapat dipertahankan hanya dengan menjalani satu garis keputusan yang hati-hati antara memberi dukungan bagi gerakan-gerakan kemerdekaan nasional (yang anti-Barat dan karenanya menyiratkan pro-Poros Komunis) dan membantu usaha perang Sekutu (yang merupakan tujuan utama Stalin). Secara umum, partai-partai komunis Timur berhasil berjalan di atas tali berisiko ini. Pernyataan Khalid Bakdash mengenai Piagam Nasional Partai Komunis Syiria dan Libanon (1943) merupakan contoh bagus: “Pertama-tama, kita bukanlah suatu partai reformasi sosial. Penegasan ini telah disematkan kepada kita oleh orang-orang yang berniat menggeser kita ke peran pinggiran dari kehidupan nasional, sehingga mereka menghimpun gerakan nasional bagi diri mereka sendiri.”<sup>71</sup>

Dalam euforia yang terjadi setelah akhir Perang Dunia II dan kelanjutan yang tampak dari persekutuan besar antara Stalin dan Barat, suatu jalan tampaknya terbuka bagi kerjasama luas yang berlanjut antara partai-partai komunis dan kelompok-kelompok lainnya di dunia Muslim, yang bertekad untuk lepas dari aturan kolonial. Setelah Perang Dunia II, banyak pemimpin Dunia Ketiga – dari Amerika Latin hingga Afrika, Timur Tengah dan Asia – terpikat oleh Marxisme-Leninisme sebagai jalan alamiah untuk menerjemahkan sentimen-sentimen nasionalis menjadi suatu rencana aksi menuju pertumbuhan ekonomi, kesetaraan politik, dan kemajuan sosial. Banyak di antara pemimpin ini berasal dari komunitas-komunitas Muslim di Asia dan Afrika. Bahkan di negara-negara yang merdeka, seperti kasus Iran, kebijakan komunis benar-benar moderat. Karenanya, pada Agustus 1946, Partai Tudeh (yang merupakan Partai Komunis yang bangkit kembali dengan nama berbeda) bergabung dalam kabinet koalisi Ahmad Ghavam, tanpa satu pun program kecuali mencegah tekanan terhadap rezim separatis Partai Demokratik Azerbaijan yang menguasai bagian barat Iran di bawah perlindungan bayonet Soviet. Episode ini tidak bertahan lama dan berakhir pada Oktober 1947, dengan dihilangkannya partai dari kabinet resmi dan penangkapan sejumlah serikat dan anggota-anggota partai.<sup>72</sup> Di India, kaum komunis mengupayakan garis yang lebih independen selama perang. Mereka mendukung pembagian India menjadi 16 wilayah terpisah, atas dasar prinsip hak menentukan-diri secara nasional. Umat Muslim memiliki “hak membentuk negara-negara otonom, dan bahkan untuk berpisah jika mereka menginginkannya, di tempat di mana mereka merupakan mayoritas yang kuat.”<sup>73</sup> Namun setelah tahun 1945, kaum Muslim ditarik kembali ke dalam aliansi dengan Kongres. Seorang veteran komunis Inggris, Palme Dutt, seorang keturunan asli India, berkunjung ke India pada 1946 dan membujuk para komunis India untuk meninggalkan apa yang ia sebut “mitos dukungan komunis untuk Pakistan.”<sup>74</sup>

## Perang Dingin dan Pengasingan-diri Komunis yang Diperbaharui

Akhir Perang Dunia II, setelah jeda waktu, disusul oleh keruntuhan aliansi masa perang antara Uni Soviet dan kekuatan-kekuatan Barat, dan berawalnya Perang Dingin. Bagi partai-partai komunis, hal ini melibatkan suatu peralihan ke kiri. Di Eropa, perintah-perintah langsung akibat perubahan ini dikeluarkan oleh seorang tokoh garis keras Uni Soviet, Andrei Zhdanov, dalam pidatonya untuk pertemuan pertama Kominform (Biro Informasi Komunis) September 1948. Partai-partai Komunis, katanya, harus “memimpin perlawanan terhadap rencana-rencana perluasan dan agresi imperialis.”<sup>75</sup>

Sebuah situasi baru tercipta bagi umat Muslim di Eropa Timur pada tahun-tahun setelah 1945 dengan berdirinya rezim-rezim komunis di Yugoslavia, Albania, dan Bulgaria. Dalam jangka pendek, model Stalinis segera diterapkan, yaitu tekanan atas organisasi-organisasi keagamaan independen dan kooptasi atas organisasi-organisasi yang masih bertahan. Pengadilan-pengadilan agama dan madrasah-madrasah ditutup; wakaf-wakaf diambil alih negara; tarekat-tarekat dilarang; penggunaan kerudung dilarang. Setelah waktu yang lama, perbedaan-perbedaan yang cukup besar muncul. Di Yugoslavia pasca-1948, menyusul penarikan kebijakan lama dari Kominform – pembangunan masjid dibiarkan kembali; semua pembatasan ibadah haji ke Mekkah dihilangkan; anak-anak kembali memperoleh pendidikan agama; madrasah-madrasah baru dibuka untuk pengkaderan para ulama; gerakan sufi diam-diam diizinkan hidup kembali; secara umum, posisi Yugoslavia di dalam Gerakan Non-Blok merupakan alasan bagus bagi Tito untuk menggunakan posisi umat Muslim sebagai suatu iklan.<sup>76</sup> Di Albania, proses sebaliknya terjadi. Selama dua dekade pertama, model kooptasi dan kontrol Stalin diikuti, dengan penunjukan para pimpinan resmi dari komunitas Sunni atau Sufi Bektashi, yang memiliki tugas berpura-pura menunjukkan kepada dunia luar bahwa umat Muslim baik-baik saja dan sepenuhnya mendukung pemerintahan komunis. Kemudian pada 1967, Albania dinyatakan sebagai negara ateis, semua tempat ibadah ditutup, dan semua komunitas agama dibubarkan.<sup>77</sup> Bulgaria berada di antara kedua tetangga Balkan-nya: di sini kebijakan tahun 1940-an masih berjalan, namun sekitar 1000 masjid tetap bertahan, 5 madrasah, dan mungkin 500 imam.<sup>78</sup>

Di luar Eropa, telah ada kecenderungan dalam partai-partai komunis untuk memutus kerjasama dengan borjuasi nasional, sehingga Stalin dan para sekutunya sekadar perlu memberikan dukungan. Kebijakan baru lebih rumit daripada kebijakan 1928-1934, karena partai-partai komunis di dunia Muslim tidak diinstruksikan untuk terlibat dalam propaganda anti-religius. Pertanyaan-pertanyaan aneh mengenai status wanita dan hukum keluarga tidak dimunculkan. Penekanan lebih kepada perlunya pemberontakan langsung untuk menumbangkan rezim kolonial dan negara-negara nasionalis borjuis yang merdeka, seperti India dan Pakistan, yang, menurut teori “dua kubu” Zhdanov, termasuk dalam kubu lawan sejauh mereka tidak bekerjasama dengan Uni Soviet. Pemberontakan Madiun 1948 di Indonesia merupakan salah satu hasil pertama dari kebijakan baru. Dalam kasus ini, seorang pemimpin komunis, Musso, kembali dari pengasingan di Uni Soviet pada Agustus 1948 dengan niat melaksanakan apa yang ia sebut “rencana Gottwald” untuk memperoleh kekuatan dengan cara yang baru saja dilakukan oleh kaum komunis di Cekoslovakia. Organisasi-organisasi non-komunis yang ada seperti Partai Sosialis, didesak untuk bergabung bersama PKI dan mengkritik diri mereka atas “kesalahan dasar berdamai dengan kaum imperialis” lewat Persetujuan Renville.<sup>79</sup> Proses peleburan tidak



sampai terjadi, ketika para pemimpin lokal PKI, dengan tanpa perhitungan, melancarkan kudeta Madiun. Musso tidak bertanggung jawab atas keputusan ini, tetapi, segaris dengan praktik solidaritas komunis, Musso mengaitkan PKI dengan hal ini setelah peristiwa tersebut. Dia berharap dapat mengamankan dukungan umat Muslim dengan memberi nada Islami kepada tindakannya: "Jika kita ingin menyelamatkan Islam agar tidak dihancurkan oleh orang-orang kafir, tiba waktunya untuk suatu jihad. Mereka berkata kita ingin menghancurkan agama, tapi kita ingin menghancurkan Belanda, bukan agama."<sup>80</sup> Sukiman, pemimpin Masjumi,<sup>81</sup> partai yang didirikan tahun 1945 untuk menyatukan semua umat Muslim yang ingin membangun Indonesia atas asas Islam, tak yakin, dan ia menyerukan para pengikutnya untuk melawan PKI, "karena dalam suatu Indonesia yang komunis, Islam tidak akan punya kesempatan bertahan hidup."<sup>82</sup> Hasilnya adalah suatu konflik brutal dengan Masjumi dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI), dan kekalahan selanjutnya di tangan tentara, diikuti penindasan yang kejam.<sup>83</sup>

Di India, pada awalnya terdapat kebimbangan yang cukup besar lantaran perbedaan kubu dalam partai. Spesialis Soviet Timur, E. Zhukov menulis pada 1947 bahwa Nehru adalah seorang "reaksioner yang kaya" dan kepemimpinan Kongres pada waktu itu adalah borjuis yang telah menyerah kepada imperialisme.<sup>84</sup> Tetapi Partai Komunis India, dipimpin oleh P.C. Joshi, melanjutkan dukungan kepada Nehru sampai Desember 1947, ketika partai mengumumkan bahwa kebijakan Nehru "melayani kubu imperialis Anglo-Amerika."<sup>85</sup> Akhirnya, Februari 1948 pada Kongres (Kalkuta) Kedua partai, Joshi digantikan sebagai Sekretaris Jenderal oleh B.T. Ranadive, dan "garis Ranadive" tentang revolusi keras untuk memperoleh suatu "negara demokratis bagi rakyat" diterapkan. Fase kebijakan komunis ini bertahan hingga 1951. Partai Komunis Pakistan, yang didirikan pada Kongres Kalkuta 1948, mengorganisir sejumlah mogok dan pemberontakan para petani tiga tahun berikutnya.<sup>86</sup> Di Iraq, pada 1948, kaum komunis memimpin pemberontakan rakyat yang gagal, dikenal sebagai *al-Wathbah*, yang diarahkan (dalam pandangan mereka) kepada "borjuis nasional" serta kepada rezim feodal Nuri al-Sa'id.<sup>87</sup> Di Mesir, pemerintahan revolusioner Gamal 'Abd. Nasser, yang memperoleh kekuasaan pada tahun 1952 dari monarki setelah suatu pemberontakan yang dipimpin oleh kaum komunis dan Ikhwanul Muslimin, dicela berulang kali oleh pers Soviet beberapa tahun berikutnya. Zhukov menyatakan posisi resmi ini pada 1949 dengan padat: "Borjuasi reaksioner dan nasionalis dalam berbagai bentuknya – Kemalisme, Gandhiisme, Zionisme, atau Pan-Arabisme – telah melangkah dengan jelas menuju kubu reaksioner imperialis."<sup>88</sup>

### **Pembebasan Nasional dan Dilema-dilemanya**

Dengan kematian Stalin dan akhir Perang Korea di tahun 1953, konflik antara Timur dan Barat mengambil bentuk yang berbeda dan lebih halus. Khrushchev mengeluarkan slogan "koeksistensi damai" dalam politik luar negeri. Bagi dunia Muslim, ini berarti bahwa upaya-upaya akan dibuat untuk menyebarkan pengaruh Soviet dengan cara damai dan tanpa kekerasan. Pada April 1955, pemerintahan Soviet menyatakan bahwa ia akan "mengembangkan kerjasama damai dengan semua negara di Timur Tengah yang tertarik dalam memperkuat kemerdekaan nasional mereka."<sup>89</sup> Khrushchev kali ini mengkritik Stalin karena gagal memahami bahwa negeri-negeri Timur Tengah yang baru merdeka kemungkinan besar akan berseteru dengan Barat. Kebijakan ini membuka jalan bagi hubungan-hubungan yang lebih dekat pada level negara dan kebijakan-kebijakan kerjasama yang diperbaharui bagi partai-partai komunis lokal. Kerjasama-kerjasama dapat

dilakukan dengan gerakan-gerakan Muslim anti-imperialis yang berusaha memperoleh kekuasaan maupun dengan revolusioner-revolusioner nasionalis yang berhasil, seperti, dalam negeri Arab, Gamal 'Abd Nasser, dan di Indonesia, Soekarno. "Borjuasi nasional" tidak lagi dikritik, tetapi dipuji sebagai "suatu tipe historis baru yang progresif di dunia di mana kapitalisme sedang mendekati ajalnya." "Borjuasi nasional telah belajar dari pengalaman," ujar Khalid (Fuad Mursi), sekretaris umum Partai Komunis Mesir (yang bersatu kembali) pada 1957, "bahwa ia tidak dapat maju tanpa dukungan kubu sosialis dari luar dan massa rakyat dari dalam."<sup>90</sup> Seperti biasanya, ada beberapa kesulitan, karena kaum nasionalis, meskipun senang menerima bantuan Soviet, menganggap komunis di negara mereka sebagai ancaman yang harus dihilangkan, dibekukan atau ditekan, sementara kaum komunis secara alamiah memiliki tujuan tertinggi mengembangkan kekuatan bagi diri mereka sendiri. Khrushchev meletakkan posisi Soviet dalam hal ini dengan blak-blakan pada 1959 terkait kampanye Nasir untuk menekan Partai Komunis Syiria: "USSR tidak memiliki niatan ikut campur dalam urusan-urusan internal negeri-negeri Arab, dan terlepas dari apa yang terjadi, USSR akan meneruskan kebijakannya memberikan bantuan dan pertolongan kepada Republik Persatuan Arab." Situasi hari ini di negeri-negeri Arab, tambahnya dengan tenang, "tidak mendukung pendirian suatu sistem komunis."<sup>91</sup> Partai Komunis Iraq, yang dulunya ada pada posisi yang sangat kuat setelah keturutsertaan pada Revolusi Juli 1958, dan faktanya menganggap diri sebagai "kekuatan politik utama dalam negeri,"<sup>92</sup> dipaksa melakukan oto-kritik pada Agustus 1959 atas "kesalahan kekiriannya" ketika berupaya mengamankan suatu bagian dalam pemerintahan baru, dan Partai ini tak pernah mengulang kembali upaya tersebut.<sup>93</sup>

Di ujung paling timur dunia Muslim, Indonesia, kebijakan Partai Komunis Indonesia (PKI) secara esensial tidaklah berbeda. Di sini terdapat suatu pemerintahan borjuasi nasional, dipimpin oleh seorang presiden nasionalis, Soekarno, didukung oleh Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dengan koalisi dari kaum Muslim (Masjumi) dan oposisi dari kaum Sosial Demokrat (PSI). PKI telah mengantisipasi ditinggalkannya kebijakan garis keras Stalin terhadap borjuasi nasional sebelum kematiannya: pada 1951 secara retrospektif, PKI mengecam pemberontakan Madiun. Ini merupakan keputusan independen yang dihasilkan oleh tim kuat yang terdiri dari empat orang – Aidit, Lukman, Njoto, dan Sudisman – yang baru saja mengambil alih kepemimpinan.<sup>94</sup> Pada 1952, pemimpin partai, D.N. Aidit, mengusulkan sebuah "front persatuan nasional" yang akan memasukkan "borjuasi nasional" (Soekarno dan PNI) tetapi menyisihkan "borjuasi komprador" (Masjumi). Kemudian di tahun 1954, kongres kelima memutuskan untuk mendukung kabinet PNI di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo, sekalipun partai tidak menganggapnya pemerintahan yang benar-benar progresif."<sup>95</sup> Ini dikarenakan Sastroamidjojo sedang mengejar tujuan-tujuan nasionalis – yang juga dimiliki komunis – untuk menghilangkan pengaruh Belanda dan mendapatkan Guinea Barat Baru (Irian Barat) untuk Indonesia. Kaum komunis juga pada akhirnya (tahun 1960) memutuskan untuk mengadopsi "Lima Sila" Soekarno, atau *Pancasila*, yang sila pertamanya ialah "Ketuhanan yang Maha Esa", sebuah ajaran utama Islam. Atas asas ini diharapkan akan menjadi mungkin untuk mendekati umat Muslim, atau setidaknya untuk menghindari penolakan *ngawur* karena dianggap sebagai partai kaum ateis.<sup>96</sup>

Periode antara 1953 dan akhir 1960-an, karenanya, ditandai oleh proses ganda di dunia Muslim, yaitu, pertama, kebangkitan dan kemenangan kaum nasionalis sekuler

(Nasir, Ba'ath di Syiria dan Iraq, Sukarno, Nehru), yang rezim-rezimnya disebut oleh USSR setelah tahun 1955 sebagai "pada dasarnya progresif, bergerak menuju sosialisme"; dan, kedua, tumbuhnya suatu gerakan komunis yang kuat, dalam kerjasama bersama kaum nasionalis, tetapi berharap untuk bergerak melampaui nasionalisme menuju sosialisme. Tumbuhnya kekuatan gerakan ini diakui secara tak langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Eisenhower pada Januari 1957 ketika ia menyebut "komunisme internasional" sebagai "ancaman terbesar" yang menghadang Timur Tengah.<sup>97</sup> Di banyak negeri non-komunis, "Sosialisme Islam" menjadi sangat populer pada tahun 1960-an, berusaha menyeimbangkan prinsip-prinsip keagamaan dengan sosialisme, yang pada dasarnya sekuler. Di Pakistan, gagasan "Sosialisme Islam" dicontohkan oleh Zulfikar Ali Bhutto, pendiri Partai Rakyat Pakistan (PPP). Ia adalah presiden Pakistan setelah perang pemutusan kerjasama antara Bangladesh dan Pakistan sampai 1973, dan perdana menteri sampai 1977. Setelah bertahun-tahun kediktatoran militer dan perang saudara, Sosialisme Islam Bhutto menjadi populer di banyak kalangan masyarakat.<sup>98</sup>

Setelah tahun 1960-an, sejumlah faktor bekerja bersama-sama untuk melemahkan komunisme di negeri-negeri Muslim. *Pertama*, beberapa partai komunis dibubarkan oleh kebijakan Soviet. Di tengah dekade 1960-an, pandangan Soviet mengenai negara-negara demokratis nasional berubah. Diputuskan bahwa negara-negara dengan satu-partai dapat diterima sebagai *partner* jika mereka mengupayakan kebijakan-kebijakan progresif. Akibatnya, partai-partai komunis tidak diperlukan di negara-negara tersebut. Mereka dapat dibubarkan, dan kaum komunis dapat bergabung ke dalam partai yang berkuasa dan bekerja dari dalam untuk mengamankan tujuan-tujuan mereka. Partai-partai komunis tidak selalu mematuhi perintah-perintah ini. Partai Mesir meminta membubarkan diri dan melakukannya pada 1965, tetapi partai Aljazair terus beroperasi secara ilegal, memunculkan insiden memalukan pada kongres ke-23 Partai Komunis Uni Soviet ketika sebuah utusan dari FLN (Front Pembebasan Nasional) Aljazair memilih *walk-out* daripada melihat anggota-anggota Partai Komunis Algeria duduk sebagai utusan.<sup>99</sup> Partai Sudan juga menolak membubarkan diri, dan berupaya bertahan sampai 1971, ketika partai ini diduga melancarkan kudeta singkat melawan Jenderal Numeiri, yang setelah tiga hari kembali ke tampuk kekuasaan dengan pertolongan Mesir dan menekan partai dengan banyak pertumpahan darah.<sup>100</sup> Kekacauan ini mendorong reorientasi tertentu kebijakan di pihak Uni Soviet. Alih-alih menyeru partai komunis untuk membubarkan diri dan memasuki rezim satu-partai sendiri-sendiri, para komentator Soviet menyarankan mereka untuk mempertahankan keberadaan mereka yang terpisah. Tetapi, mereka tetap harus mengakui kepatuhan niscaya mereka kepada pemerintahan nasionalis. "Kerjasama komunis dengan para demokrat nasional bukanlah suatu perkembangan sepintas saja, tetapi merupakan suatu perspektif yang bercakupan luas. Di sejumlah negara, partai-partai demokratik nasional merupakan partai-partai berkuasa yang memainkan peran utama dalam gerakan kemerdekaan nasional dan perkembangan non-kapitalis." Para komunis harus menerima ini sebagai fakta dan tidak perlu gusar: "Partai-partai proletar tidak mengedepankan emosi, tetapi bertolak dari analisis kelas yang objektif."<sup>101</sup> *Kedua*, partai-partai komunis di mana-mana porak-poranda oleh represi. Daftar partai-partai yang menderita dengan cara ini begitu panjang, tetapi penjelasannya secara garis besar selalu sama. Mereka terlalu berhasil. Dengan dukungan massa dan sekutu-sekutu di dalam militer, mereka tampak dekat memperoleh kekuasaan. Sekutu-sekutu nasionalis mereka sebelumnya terlibat menghalangi hal ini, terkadang didukung oleh agensi-agens

pemerintahan Amerika Serikat, terkadang dibantu oleh kekuatan-kekuatan yang cenderung tradisional di dalam negeri itu sendiri.

Di Indonesia, PKI mempertaruhkan segalanya pada kerjasamanya dengan Soekarno dalam perjuangan “anti-penjajahan” dan menumbuhkan permusuhan yang bertahan cukup lama dari para Muslim *santri* kaya, melalui kampanyenya pada 1963-1965 untuk mendukung perampasan dari para tuan tanah besar di Jawa.<sup>102</sup> Kampanye PKI tahun 1964 untuk reforma tanah juga cenderung mengasingkan seluruh umat Muslim atas alasan keagamaan, karena di bawah sistem wakaf, ulama berada dalam posisi tuan tanah. Robert Hefner menulis tentang “hubungan antara kekayaan dan agama” dalam konteks ini.<sup>103</sup> Bahkan sebelum pembantaian 1965, terjadi bentrokan-bentrokan antara umat Muslim dan komunis di dekat Kediri di akhir 1964 dan Januari 1965.<sup>104</sup> Pada September 1965, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia akan segera memasuki tahapan kedua revolusi, yaitu sosialisme; lalu menyusul apa yang tampak sebagai kudeta disengaja yang dilakukan oleh elemen-elemen pro-komunis di dalam tentara.<sup>105</sup> Setelah memberangus kudeta, pimpinan tinggi tentara, Soeharto dan Nasution, menyatakan bahwa PKI bertanggung jawab atas hal ini, terlepas penyangkalan PKI atasnya, dan organisasi-organisasi Muslim utama menyerukan “penumpasan PKI”. Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa “pembasmian kaum komunis merupakan suatu tindakan jihad yang wajib” (7 Oktober 1965).<sup>106</sup> Taksiran korban pembantaian bermacam-macam, tetapi 500.000 jiwa adalah angka yang biasa disebutkan.<sup>107</sup> Indonesia merupakan suatu kasus yang tidak biasa, karena umat Muslim awam turut-serta dalam tindakan pemberangusan tersebut. Di tempat lain, umumnya penguasa militerlah yang memberangus partai dan membunuh para pemimpinnya, jika mereka dapat menangkapnya. Ini terjadi di Syiria tahun 1959; di Iraq tahun 1963, ketika pemimpin komunis Husain al-Radi terbunuh; di Aljazair tahun 1965 ketika Kolonel Boumedienne mengusir para komunis dari pemerintahan dan dari FLN; di Sudan tahun 1971 ketika Jenderal Numeiri membunuh sekretaris umum Partai Komunis, Abdul Khalid Mahgoub. Selain menderita pemberangusan yang kejam dan memilukan, sebagian besar partai komunis di dunia Muslim juga terpecah menjadi kubu-kubu yang berlawanan, di bawah tekanan dukungan berkelanjutan Soviet bagi rezim yang memberangus mereka.<sup>108</sup> Argumen-argumen meyakinkan dari pemimpin China, Mao Zedong, juga berperan dalam mendorong proses perpecahan ini. Dalam banyak kasus, partai-partai komunis pro-China muncul sebagai rival partai-partai yang segaris dengan Moskow.

Perubahan ketiga di tahun 1960-an adalah bahwa rezim-rezim nasionalis di dunia Arab dan di luar Arab menderita sejumlah hilangnya kepercayaan setelah 1967 lantaran kekalahan dalam Perang Enam Hari, yang tampaknya menunjukkan bahwa mereka tidak mampu mencapai tujuan paling populer dari nasionalisme Arab, dan mungkin dari umat Muslim secara umum, yaitu memerdekakan warga Palestina dari kekuasaan Israel.

Alasan keempat dan terakhir bagi perubahan ini adalah alasan sosio-ekonomis: meningkatnya kekayaan minyak dari beberapa unsur elite perkotaan dari masyarakat Muslim menghasilkan integrasi yang lebih besar dengan ekonomi dunia dan – terlepas upaya beberapa penguasa tradisional – budaya Barat.

Dalam upaya menanggapi semua kecenderungan ini, sebuah perlawanan Islami yang kuat dan gigih tumbuh, yang diarahkan bukan hanya melawan pengaruh Barat dan

komunis, tetapi juga melawan para penguasa nasionalis sekuler yang ada, terkadang menggunakan metode perjuangan yang ekstrem. Perkembangan baru ini dilihat Uni Soviet sebagai hal yang sangat mengganggu, baik secara internal (karena dampaknya yang mungkin terhadap umat Muslim Asia Tengah) maupun eksternal (karena mengancam kestabilan sekutu-sekutu nasionalis sekuler). Islam Politik merupakan suatu fenomena baru di hampir semua wilayah. Periode antara 1924, ketika Mustafa Kemal menghapuskan kekhilafahan, dan tahun 1960-an merupakan rentang di mana kegiatan politik Islam, seperti ditulis L. Carl Brown, “didiamkan.”<sup>109</sup> Selama bertahun-tahun kaum komunis telah dituntut mengambil posisi terkait hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan dan tradisi Islam tentu saja, namun mereka tidak berhadapan dengan rival serius dalam bentuk Islam Politik.<sup>110</sup> Empat faktor politis utama yang harus mereka perhitungkan adalah para nasionalis sekuler, kekuatan kolonial atau pascakolonial, Uni Soviet, dan massa rakyat. Kini, untuk kali pertama, Islam mulai memasuki panggung sebagai suatu kekuatan politis.

### **Kebangkitan Islam Politik dan Kehancuran Uni Soviet**

Invasi Uni Soviet atas Afghanistan, Revolusi Iran, dan pencapaian kekuasaan tunggal oleh Saddam Hussein di Iraq membuat tahun 1979 menjadi titik balik. Tetapi, invasi Soviet atas Afghanistan-lah, lebih dari hal-hal lainnya, yang tiba-tiba mengakhiri keharmonisan yang nyaman dari era Brezhnev antara pemerintahan Soviet dan umat Muslim di negeri Soviet. Satu periode penutupan-diri kemudian dimulai bagi partai-partai komunis. Kelompok-kelompok Islam kemudian kini memiliki arti yang lebih besar dibanding sebelumnya (Revolusi di Iran mengilhami gerakan-gerakan di Libanon dan Palestina, dan Ikhwanul Muslim membangkitkan perlawanan di Syria pada Februari 1982). Tetapi, kerjasama dengan partai-partai ini praktis dibuat mustahil oleh dukungan komunis atas campur tangan Soviet di Afghanistan.

Uni Soviet membuat upaya sia-sia untuk tetap menjalin hubungan baik dengan sekutu-sekutu Muslim, terlepas isu Afghanistan. Artikel-artikel di surat kabar Soviet menekankan watak progresif Islam. Leonid Medvenko menulis pada 1980: “Gerakan pembebasan nasional, yang kerap kali membawa panji Islam, dipimpin bukan hanya untuk melawan imperialisme, tetapi secara bertahap melawan dasar-dasar kapitalisme itu sendiri.”<sup>111</sup> Pemerintahan Iran yang baru tidak yakin. Ayatollah Khomeini menolak keras Barat dan Timur. Ia mengutuk invasi atas Afghanistan. “Saya dengan tegas mengutuk,” ucapnya, “pendudukan keji atas Afghanistan oleh para perampok dan pelaku pendudukan Timur yang agresif.” Khomeini mencela gagasan mengenai hubungan antara Marxisme dan Islam: “Beberapa orang telah mencampur aduk gagasan-gagasan Islam dengan gagasan-gagasan Marxis dan menciptakan suatu campuran yang dalam semua hal tak mungkin bersesuaian dengan ajaran-ajaran progresif Islam.”<sup>112</sup>

Hubungan Soviet-Iran menjadi begitu dingin, dan secara meningkat, kaum komunis sulit beroperasi di dalam negeri. Kantor-kantor Partai Tudeh di Teheran disatroni pada Juli 1980 oleh para militan Islam. Pemerintahan Soviet tidak menanggapi, kecuali mengkritik mereka yang “menyulut kaum fanatik religius untuk bertindak melawan kekuatan-kekuatan demokratis dan kekuatan kiri lainnya, terutama Partai Tudeh, yang menyokong garis kebijakan anti-imperialis Ayatollah Khomeini.”<sup>113</sup> Tetapi keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk bagi partai ini, sampai akhirnya pada 1983

dibubarkan dan 45 komunis dibunuh karena tuduhan memata-matai.<sup>114</sup> Terlebih lagi, kerjasama-kerjasama dengan rekan nasionalis sekuler juga dipersulit pada masa ini oleh pemberangusan-pemberangusan yang dilakukan oleh Saddam di Iraq, Assad di Syiria, dan Sadat serta Mubarak di Mesir. Jawaban Soviet bagi perkembangan ini ialah mendesak para komunis Arab untuk “bersabar dan menyadari bahwa evolusi dari rezim demokratis revolusioner menuju sosialisme adalah suatu proses yang sangat panjang.”<sup>115</sup> Namun, banyak kaum komunis Arab meragukan apakah evolusi ini suatu saat akan terwujud, dan beberapa dari mereka menarik kesimpulan bahwa partai-partai resmi dengan garis kebijakan Moskow telah mencapai jalan buntu. Sejak inilah terjadi perpecahan komunisme yang telah dimulai di tahun 1960 di Iraq, Syiria, dan Iran, yang kini berlanjut dan memburuk karena semua partai berada dalam pengasingan.

### **Komunis Mengambang dalam Situasi Tidak Jelas**

Era *perestroika*\* dan keruntuhan Uni Soviet sesudahnya membuat partai-partai komunis resmi kehilangan petunjuk yang digunakan selama puluhan tahun, tetapi peristiwa-peristiwa ini juga membuka jalan bagi munculnya situasi-situasi baru dan pemikiran-pemikiran baru. Di Libanon, pemimpin deputi Partai Komunis, Karim Mroué, menyarankan, di tahun 1986, agar partai seharusnya memeriksa hubungannya dengan agama dan, seperti diucapkannya, dengan “warisan Arab”, dan hal ini memulai perdebatan dua tahun yang memuncak dalam perubahan di dalam program partai. Program baru ini menekankan solidaritas dengan kubu-kubu rakyat Palestina, dialog-dialog dengan gerakan-gerakan agama, kerjasama dengan semua kekuatan sosial di dalam bangsa Arab, dan perjuangan untuk kemerdekaan wilayah-wilayah yang dijajah, termasuk Libanon selatan.<sup>116</sup> Suatu dasar karenanya telah diletakkan bagi kerjasama Partai Komunis Libanon dengan Hezbollah 15 tahun kemudian.<sup>117</sup>

Di era setelah Perang Dingin, umat Muslim dan berbagai kelompok sayap-kiri serta Marxis bergandengan kembali, karena mereka menghadapi musuh-musuh yang sama – imperialisme, kolonialisme, militerisme, rasisme, dan Zionisme. Gerakan-gerakan anti-perang global secara alamiah menciptakan kerjasama antara kaum kiri dan aktivis Muslim. Pada Desember 2002, sebelum invasi Iraq pada Maret 2003, sebuah pertemuan diadakan di Mesir yang mengembalikan kaum kiri Internasional dan aktivis Muslim berada dalam *platform* yang sama. Pertemuan itu menghasilkan Deklarasi Kairo pertama “Melawan Hegemoni Amerika Serikat dan Perang di Iraq, serta Dalam Solidaritas bersama Palestina.” Pada Desember 2003, Deklarasi Kairo kedua diumumkan, yang tujuannya mencakup “upaya berkelanjutan dari perjuangan untuk mendukung front internasional melawan imperialisme dan globalisasi kapitalis.”<sup>118</sup>

Di Libanon, Partai Komunis telah membuat persiapan ideologis yang niscaya memungkinkannya membentuk suatu kerjasama dengan *Hezbollah*, “Partai-nya Tuhan”, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Pada 2007, kedua kelompok bergabung bersama untuk menciptakan sebuah front perlawanan nasional. Mereka juga membentuk tentara-tentara rakyat yang menentang masuknya komando Israel ke desa-desa tertentu. Ketika invasi Israel dimulai, Hezbollah memimpin perlawanan nasional. Partai Komunis

---

\* *Perestroika* (Rusia, “pembangunan kembali”), serangkaian program reformasi ekonomi dan politik di Uni Soviet yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev pada 1986.

Libanon mewujudkan sebuah mobilisasi penuh dari partainya untuk membantu Hezbollah dalam gerakan politik, dalam upaya mempertahankan bagian selatan dan dalam operasi-operasi internal untuk menolong jutaan pengungsi yang menyelamatkan diri dari pengeboman Israel. Dalam suatu pawai di Damaskus, para pedemo membawa gambar-gambar pejuang revolusioner Amerika Latin Che Guevara dan pemimpin Hezbollah Sheikh Hasan Nasrallah. Kini, Hezbollah dan Partai Komunis Libanon bersama-sama membahas perlunya mengembangkan “proyek-tandingan terhadap model neo-liberal”, kebijakan pasar bebas yang disokong Washington.<sup>119</sup>

Pemimpin Kuba, Fidel Castro, dalam suatu pernyataan pada 2007 ketika bertemu dengan Menteri Kesehatan Iran, Mohammad Farhadi, memuji visi Ayatollah Ruhollah Khomeini, dan mengatakan bahwa model Al-Qur’an mengenai pemerintahan seharusnya dilihat sebagai pengganti bagi sistem-sistem bergaya Barat. Fidel menambahkan: “Kita juga memiliki satu musuh bersama yang selalu mengancam kita – satu musuh yang telah menginvasi semua negara di dunia.”<sup>120</sup>

## **Kesimpulan**

Sejarah politis mengenai kaum Marxis dan umat Muslim menunjukkan bahwa kerjasama antara dua kekuatan yang berseberangan ini telah terjadi beberapa kali selama abad ke-20. Pada dasarnya, adanya satu musuh bersama-lah yang merangsang kerjasama sementara antara keduanya.

Meski begitu, hubungan antara komunisme dan Islam bukan sepenuhnya tanpa masalah. Sementara terdapat banyak hal, baik dalam ideologi maupun situasi, yang membuat kaum Muslim dan kaum komunis bergandengan-tangan, ada pula banyak poin pertentangan yang memisahkan mereka. Pandangan dunia komunis bertentangan dengan semua jenis agama, termasuk Islam. Pembagian ideologis mendasar ini tidak otomatis terungkap dalam politik-politik praktis, dan sering kali ada alasan-alasan teknis untuk menomorduakannya. Tetapi, ia tetap ada di sana, di bawah permukaan. Ada pula beberapa poin perselisihan, khususnya dalam kasus Islam tradisional, terkait *status quo* lokal yang ingin dilawan oleh kaum komunis, terlepas betapapun kuat kesepakatan keduanya untuk melawan imperialisme Barat. Ketika kaum komunis menyerukan untuk reforma tanah, contohnya, hal ini dapat pula melibatkan serangan terhadap dasar-dasar agama di bidang perwakafan (seperti di Indonesia 1964, contohnya). Kampanye-kampanye untuk emansipasi wanita dapat pula termasuk agitasi melawan kerudung, dan hal ini rentan menimbulkan perlawanan tajam dari umat Muslim yang berpikiran tradisional (seperti di Uni Soviet akhir tahun 1920-an). Dalam konteks ini, sikap permusuhan kubu Islamisme kepada gerakan-gerakan Marxis, dan penggunaan kelompok-kelompok Islam untuk melawan komunisme Soviet dan kiri yang lebih luas selama Perang Dingin, layak mendapatkan analisis serius.

Dengan demikian terdapat dua kecenderungan, terhadap kerjasama dan terhadap permusuhan. Manakah yang terjadi, tergantung pada periode dan kondisi sosial dan politis dari wilayah tersebut. Di dalam kumpulan esai ini, para kontributor akan menguji berbagai tanggapan kaum komunis terhadap Islam. Terlebih karena kerjasama itu melibatkan keduanya, mereka juga akan memeriksa sikap-sikap yang berkembang dari Islam Politik terhadap komunisme.

## Catatan

<sup>1</sup> Dalam B. Lazitch and M.M. Drachkovich, *Lenin and the Comintern*, Vol. I (Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1972), h.379.

<sup>2</sup> Y. Ro'i, *Islam in the Soviet Union: From the Second World War to Gorbachev* (London: Hurst, 2000)

<sup>3</sup> A. Khalid, 'Nationalizing the Revolution in Central Asia: The Transformation of Jadidism, 1917–1920', dalam R.G. Suny and T. Martin (eds.), *A State of Nations: Empire and Nation Making in the Age of Lenin and Stalin* (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp.145–62.

<sup>4</sup> V.I. Lenin, *Selected Works*, Vol.3 (Moscow: Progress Publishers, 1967), h.290; juga tersedia dalam Gerry Byrne, 'Bolsheviks and Islam, Part 3: Islamic Communism', *Workers' Liberty*, 17 March 2004, tersedia di <http://www.workersliberty.org/node/1864/print4>, diakses pada 26 Nov. 2008.

<sup>5</sup> Bertold Spuler, 'Djadid', *Encyclopaedia of Islam*, edisi Kedua (Leiden: Brill, 1965), Vol.2, h.366.

<sup>6</sup> A. Khalid, *The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia* (Berkeley, CA: University of California Press, 1998), h.8.

<sup>7</sup> A. Bennigsen and Ch. Lemerquier-Quelquejay, *Les Mouvements nationaux chez les musulmans de Russie* (Paris: Mouton, 1960), pp.52–6.

<sup>8</sup> R.G. Landa, *Islam v istorii Rossii* (Moscow: Vostochnaya literatura, 1995), h.182, mengutip dari buku A. Takho-Godi's 1927, *Revolutsiya i kontr-revolutsiya v Dagestane* (Makhachkala: Dagestanskoye Gos. Izdatel'stvo).

<sup>9</sup> S.A. Dudoignon, 'Djadidisme, mirasisme, islamisme', *Cahiers du Monde Russe* (CMR), Vol.37, Nos.1–2 (1996), pp.13–40 (h.23).

<sup>10</sup> R. Eisener, 'Bukhara v 1917 g.', *Vostok*, 1994, No.5, pp.75–81.

<sup>11</sup> Hélène Carrère d'Encausse, *Islam and the Russian Empire: Reform and Revolution in Central Asia* (London: Tauris, 1988), h.168.

<sup>12</sup> Khalid, *The Politics of Muslim Cultural Reform*, h.245.

<sup>13</sup> S.M. Iskhakov, *Rossiiskie Musul'manen i revolyutsiya* (Moscow: Izdatel'stvo "Sotsial' no politicheskaya Mysl", 2004), p.362.

<sup>14</sup> Khalid, *The Politics of Muslim Cultural Reform*, pp.288–9.

<sup>15</sup> Ibid., h.294, mengutip traktat Fitrat th. 1919, *Sharq siyasaki* (Politics of the East).

<sup>16</sup> Bennigsen and Quelquejay, *Les Mouvements Nationaux*, h.101.

<sup>17</sup> Ibid., h.236, mengutip artikel Sultan-Galiev th. 1921 'Methods of Anti-Religious Propaganda among Muslims'.

<sup>18</sup> Walaupun keputusan-keputusan terakhir dan pidato-pidato Stalin diterbitkan, rincian konferensi partai ini dirahasiakan; ini baru diketahui 67 tahun kemudian, dan diterbitkan di Moskow tahun 1992 dalam B.F. Sultanbekov (ed.), *Tainy natsional'noi politiki TsK RKP: chetvörtoe Soveshchanie TsK RKP*, dengan pengantar oleh B.F. Sultanbekov (Moscow: Insan, 1992).

<sup>19</sup> *Tainy natsional'noi politiki TsK RKP*, h. 84–85.

<sup>20</sup> S.A. Dudoignon, 'La Question scolaire en Boukhara et au Turkestan russe', *CMR*, Vol.37, Nos.1–2 (1996), h.133–210 (h.186).

<sup>21</sup> A.G. Park menjelaskan hal ini dalam penelitiannya yang hati-hati atas literatur yang diterbitkan, *The Bolsheviks in Turkestan 1917–27* (New York: Columbia University Press, 1957), dan gambaran ini tidak diubah secara substansial untuk tahun 1920-an oleh para penulis berikutnya yang memiliki akses kepada sumber-sumber dokumenter, seperti Shoshana Keller atau Terry Martin.

<sup>22</sup> Hal ini telah dianalisis dengan rinci oleh Terry Martin dalam *The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001).

<sup>23</sup> Wakaf (jamak, *awqaf*): institusi amal umat Muslim.



---

<sup>24</sup> Hans Bräker, 'Soviet Policy toward Islam', dalam A. Kappeler, Gerhard Simon and Georg Brunner (eds.), *Muslim Communities Reemerge: Historical Perspectives on Nationality, Politics, and Opposition in the Former Soviet Union and Yugoslavia* (Durham, NC: Duke University Press, 1994), pp.157–82 (pp.166–7). Bräker mungkin menggambarkannya terlalu kuat di sini, pertama, karena kebijakan Soviet kepada Islam tahun 1920-an dicirikan oleh campuran ambigu antara toleransi dan represi, dan kedua, karena kebijakan tersebut tidak selalu konsisten di antara berbagai wilayah di Uni Soviet: di Chechnya, contohnya, serangan-serangan kepada institusi-institusi Muslim dimulai tahun 1925, lebih awal dari daerah lain, setelah pemecatan pemimpin partai lokal, Tashtemir El'darkhanov.

<sup>25</sup> John Riddell (ed.), *To See the Dawn: Baku, 1920. First Congress of the Peoples of the East* (London: Pathfinder Press, 1993), Appendix 2, h.259.

<sup>26</sup> 'Theses on the Fundamental Tasks of the Second Congress of the Communist International', dalam V.I. Lenin, *Collected Works*, Vol.31 (Moscow: Progress Publishers, 1977), h.184–201 (h.193).

<sup>27</sup> 'Report of the Commission on the National and the Colonial Question', dalam V.I. Lenin, *Collected Works*, Vol.31, h. 240–45 (h. 240–41).

<sup>28</sup> Lenin, *Collected Works*, Vol.42, h.196.

<sup>29</sup> Stephen White, 'Communism and the East: The Baku Congress, 1920', *Slavic Review*, Vol.XXXIII, No.3 (1974), h. 492–514.

<sup>30</sup> Terjemahan Inggris dari undangan ini tercantum dalam *the Weekly Summary of Intelligence Reports* dikeluarkan oleh S.I.S. (Constantinople Branch), untuk akhir pekan 2 Sept. 1920, tersedia di Kantor Pencatatan Umum (the Public Records Office), London, FO 371/ 5177, pp.29–30.

<sup>31</sup> G.Z. Sorkin, *Pervyi s'ezd narodov vostoka* (Moscow: IVL, 1961), pp.16–17

<sup>32</sup> M.N. Roy, *M.N. Roy's Memoirs* (Bombay and New York: Allied Publications, 1964), h.392.

<sup>33</sup> Kongres Baku dibahas dalam Sorkin, *Pervyi s'ezd narodov vostoka; Birinci Dogu Halklari Kurultayi – Baku 1–8 Eylül 1920. Stenoyla tutulmus tutanak*; White, 'Communism and the East'; Mete Tunçay, *Türkiye'de Sol Akimlar* (Ankara: BDS Yayınları, 1991), pp.209–17; Şevket Su'reyya Aydemir, *Suyu Arayan Adam* (Ankara: Öz Yayınları, 1959), pp.187–98.

<sup>34</sup> *Izvestiya*, 21 Sept. 1920; *Pravda*, 8 dan 16 Sept. 1920; *Kommunisticheskii Internatsional*, 14 (16 Nov. 1920), col. 2941.

<sup>35</sup> *Tunçay, Türkiye'de Sol Akimlar*, pp.209–11.

<sup>36</sup> Sorkin, *Pervyi s'ezd narodov vostoka*, h.31.

<sup>37</sup> A.I. Mikoyan, *Mysli i vospominaniya o Lenine* (Moscow: Izdatel'stvo Politicheskoi Literatury, 1970), pp.49–50; Tunçay, *Türkiye'de Sol Akimlar*, pp. 215–17.

<sup>38</sup> Diterbitkan dalam *Kommunisticheskii Internatsional*, 15 (20 Des. 1920), cols.3141–50.

<sup>39</sup> Shaumian dan 25 petinggi Bolshevik lainnya dari Baku ditangkap dan dibunuh pada 20 September 1918. Ketika kabar pembantaian ini sampai ke Moskow, pemerintah Bolshevik menyalahkan para pejabat Inggris karena bertanggung jawab atas kematian 26 petinggi Bolshevik di Baku. Lihat Büilent Gökay, *A Clash of Empires* (London: Tauris, 1997), pp.30–35.

<sup>40</sup> Anastas Mikoyan, *Memoirs of Anastas Mikoyan: The Path of Struggle*, Vol.I (Madison, CT: Sphinx Press, 1988), pp.201–2.

<sup>41</sup> Riddell (ed.), *To See the Dawn*, h.183.

<sup>42</sup> Pidato pada Kongres Baku, dikutip dalam Hélène Carrère d'Encausse dan Stuart R. Schram, *Marxism and Asia: An Introduction with Readings* (London: Allen Lane, 1969), pp.170–73 (h.173).

<sup>43</sup> Carrère d'Encausse and Schram, *Marxism and Asia*, h.153. Rujukan kepada 'khans' dan 'mullahs' diganti dengan 'clergy' dalam *Theses* seperti yang terakhir dikeluarkan.

<sup>44</sup> Carrère d'Encausse dan Schram, *Marxism and Asia*, h.188.

<sup>45</sup> Takashi Shiraishi, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912–1926* (Ithaca, NY and London: Cornell University Press, 1990), pp.285, 296.

---

<sup>46</sup> Reynaldo Ileto, 'Religion and Anti-Colonial Movements', dalam Nicholas Tarling (ed.), *The Cambridge History of Southeast Asia*, Vol.2, Part 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), pp.193–244 (pp.242–3).

<sup>47</sup> Albert Habib Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798–1939* (London: Oxford University Press, 1962), h.304.

<sup>48</sup> Bennigsen and Quelquejay, *Les Mouvements nationaux*, h.98.

<sup>49</sup> Ideologi Sarekat Islam dan evolusi dari relasinya dengan sosialisme dan komunisme dianalisis dengan rinci dalam Hans Bräker, *Kommunismus und Weltreligionen Asiens. Zur Religions- und Asienpolitik der Sowjetunion. Band I.2. Kommunismus und Islam* (Tübingen: J.C.B. Mohr 1971), h. 202–234.

<sup>50</sup> Partai ini mengganti namanya menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1924.

<sup>51</sup> Tan Malaka, 'Der Kommunismus auf Java', *Internationale Presse-Korrespondenz*, No.29 (21 July 1923), h.700.

<sup>52</sup> Leslie Hugh Palmier, *Communists in Indonesia* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1973), h.99

<sup>53</sup> Martin, *The Affirmative Action Empire*, h.188.

<sup>54</sup> I. Baldauf, *Schriftreform und Schriftwechsel bei den muslimischen Russland- und Sowjettürken (1850–1937): ein Symptom ideengeschichtlicher und kulturpolitischer Entwicklungen* (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993), h. 416.

<sup>55</sup> Ini merupakan argumen yang diajukan oleh promotor utama Latinisasi, pemimpin komunis Azerbaijan, Agamali-Oglu.

<sup>56</sup> Gregory J. Massell, *The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary Strategies in Soviet Central Asia, 1919–1929* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974), h.238.

<sup>57</sup> S. Keller, *To Moscow not Mecca: The Soviet Campaign Against Islam in Central Asia, 1917–1941* (Westport, CT: Praeger, 2001), h.116.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h.153.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h.241.

<sup>60</sup> Kampanye melawan "bertahannya agama" yang dilancarkan oleh Nikita Khrushchev di awal tahun 1960-an jauh kurang brutal dan kurang berapi-api dibandingkan kampanye Stalin tahun 1930-an, dan akibatnya hal ini diredam oleh Brezhnev setelah 1964.

<sup>61</sup> Keller, *To Moscow not Mecca*, h.248.

<sup>62</sup> Sh.F. Mukhamedyarov and B.F. Sultanbekov, 'Mirsaid Sultan-Galiev: His Character and Fate', *Central Asian Survey*, Vol.IX, No.2 (1990), pp.109–17.

<sup>63</sup> Memoar-memoar Aygermen, seorang Muslim Daghestani yang berperang dalam Tentara Merah, memberi beberapa petunjuk mengenai situasi umat Muslim Kaukasus Utara dalam periode ini: lihat S. Aymergen, *Son Kopru* (Istanbul: Gulan Grafik, 1992).

<sup>64</sup> Tesis yang diambil oleh kongres Komintern keenam pada September 1928, dikutip dalam Carrère d'Encausse and Schram, *Marxism and Asia*, h.239.

<sup>65</sup> Dikutip dari ringkasan-ringkasan dalam Jane Degras (ed.), *The Communist International 1919–43: Documents, Vol.2* (London: Cass, 1971), h.541.

<sup>66</sup> Hanna Batatu, *The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978), h. 407; hal ini dicela pada 1935 sebagai suatu kesalahan taktis yang serius.

<sup>67</sup> Ringkasan dari keputusan-keputusan kongres ketujuh Komunis Internasional, dikutip dalam Carrère d'Encausse dan Schram, *Marxism and Asia*, h.248.

<sup>68</sup> Carrère d'Encausse dan Schram, *Marxism and Asia*, p.249.

<sup>69</sup> A.G. Samarbaksh menyatakan bahwa Partai Komunis Syiria dan Lebanon (CPSL) melanjutkan perjuangan anti-fasisnya dari tahun 1939 ke 1941, walaupun Batatu menceritakan kepada kita bahwa pernyataan komunis Syiria tahun 1940 tentang perang, seperti pernyataan Iraqi, menyerukan netralitas antara dua pihak dalam perang. Lihat, secara berurutan, A.G. Samarbaksh, *Le Socialisme en Irak et en Syrie* (Paris: Éditions Anthropos, 1978), h.111, dan Batatu,

---

*The Old Social Classes*, h.453, n.53. Perbedaan yang ada, sederhananya, ialah bahwa terdapat sebuah partai politik fasis yang kentara di Syiria pada waktu itu, tetapi bukan di Iraq, sehingga suatu “perjuangan anti-fasis” bercorak Eropa lebih berarti di Syiria.

<sup>70</sup> G.D. Overstreet dan M. Windmiller, *Communism in India* (Berkeley, CA: University of California Press, 1959), h.200.

<sup>71</sup> T.Y. Ismael dan J.S. Ismael, *The Communist Movement in Syria and Lebanon* (Gainesville, FL: University Press of Florida, 1998), h.33.

<sup>72</sup> S. Zabih, *The Communist Movement in Iran* (Berkeley, CA: University of California Press, 1966), pp.115–16.

<sup>73</sup> Overstreet dan Windmiller, *Communism in India*, p.215.

<sup>74</sup> *Ibid.*, h.240.

<sup>75</sup> G. Procacci (ed.), *The Cominform. Minutes of the Conferences 1947/1948/1949* (Milan: Feltrinelli Editore, 1994), h. 251.

<sup>76</sup> A. Popovic, *L’Islam balkanique* (Berlin: Otto Harrassowitz, 1986), pp.347–54.

<sup>77</sup> *Ibid.*, pp.42–54.

<sup>78</sup> *Ibid.*, h.103. Pengarang menyatakan bahwa data mengenai pembahasan ini sangatlah terbatas.

<sup>79</sup> Ini merupakan sebuah gencatan senjata yang dibuat pada Januari 1948 antara Amir Sjarifuddin, Perdana Menteri Indonesia dan Menteri Pertahanan, dan para penguasa Belanda, di mana Belanda mempertahankan penguasaannya atas Indonesia secara sementara sampai suatu voting memutuskan nasib negeri ini.

<sup>80</sup> Bräker, *Kommunismus und Weltreligionen Asiens*, Vol.2, h.357.

<sup>81</sup> Masjumi merupakan sebuah singkatan untuk Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Badan Permusyawaratan Umat Muslim Indonesia).

<sup>82</sup> Bräker, *Kommunismus und Weltreligionen Asiens*, Vol.2, h. 358.

<sup>83</sup> G. McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1952), pp.258–300, memberikan suatu laporan rinci atas peristiwa-peristiwa ini.

<sup>84</sup> Ye. Zhukov, ‘K polozheniyu v Indii’, *Mirovoe khozyaistvo i mirovaya politika*, 1947, No.7, pp.3–14 (h.10).

<sup>85</sup> Overstreet dan Windmiller, *Communism in India*, h.261–273.

<sup>86</sup> T. Maniruzzaman, ‘Radical Politics and the Emergence of Bangladesh’, in P.R. Brass dan M.F. Franda (eds.), *Radical Politics in South Asia* (Cambridge, MA: MIT Press, 1973), pp.226–7.

<sup>87</sup> Batatu, *The Old Social Classes*, h.562.

<sup>88</sup> V. Segesvary, *Le Réalisme Khrouchtchévien* (Neuchâtel: Éditions de la Baconnière, 1968), h.140. Dapat menjadi salah untuk terlalu menekankan peran instruksi Moskow dalam berbagai pemberontakan komunis pada 1947-1951. Seperti komentar C.M. Turnbull, “Berbagai pemberontakan dan perang di Asia Tenggara bukan bagian dari suatu strategi Soviet yang direncanakan sebelumnya”. Hal-hal ini lebih mencerminkan “ambisi-ambisi yang membingungkan dari kaum komunis”, lihat N. Tarling (ed.), *The Cambridge History of Southeast Asia*, Vol.2, Part 1, h.600.

<sup>89</sup> O.M. Smolansky, *The Soviet Union and the Arab East under Khrushchev* (Lewisburg, PA: Bucknell University Press, 1974), h.28.

<sup>90</sup> Dikutip dalam Segesvary, *Le Réalisme Khrouchtchévien*, h.148.

<sup>91</sup> Dikutip dalam *ibid.*, h.182.

<sup>92</sup> Batatu, *The Old Social Classes*, h.909, mengutip sebuah pernyataan dalam *Ittihad al-Sha’b* (Persatuan Rakyat), 10 July 1959.

<sup>93</sup> Segesvary, *Le Réalisme Khrouchtchévien*, h.183. Perlu ditambahkan bahwa Batatu (*The Old Social Classes*, h. 929) melihat hal ini sebagai cerminan kemenangan kubu kanan dalam suatu perjuangan faksional internal di dalam Partai Komunis Irak daripada suatu tanggapan terhadap kritik Soviet.

---

<sup>94</sup> Lihatlah sketsa singkat mengenai keempatnya yang ditulis dalam Rex Mortimer, *Indonesian Communism under Sukarno. Ideology and Politics, 1959–1965* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1974), pp.29–40.

<sup>95</sup> Mortimer, *Indonesian Communism under Sukarno*, h.48.

<sup>96</sup> *Ibid.*, h.67.

<sup>97</sup> Peter Mansfield, *A History of the Middle East*, edisi kedua (London: Penguin, 2003), pp.260–61.

<sup>98</sup> Adrian Morgan, 'Europe's Islamist–Leftist Alliance', Part II, 28 April 2007, tersedia di <http://www.frontpagemagazine.com/Articles/Read.aspx?GUID%403178FAF-849B-468EA4D6-6A1EF5D32DF4>.<sub>2</sub> diakses pada 26 Nov. 2008.

<sup>99</sup> D. Ottaway and M. Ottaway, *Algeria: Politics of a Socialist Revolution* (Berkeley, CA: University of California Press, 1970), h.234.

<sup>100</sup> Roger E. Kanet, 'Soviet Attitudes since Stalin', dalam Roger E. Kanet (ed.), *The Soviet Union and the Developing Nations* (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1974), h.41.

<sup>101</sup> R. Ulianovsky, 'Marxist and Non-Marxist Socialism', *World Marxist Review*, Vol.14, No.9 (1970), pp.125–7.

<sup>102</sup> J. Walkin, 'Muslim–Communist Confrontation in East Java 1964–65', *Orbis*, Vol.13, No.3 (1969), pp.829–30.

<sup>103</sup> R.W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000), h.54.

<sup>104</sup> K.R. Young, 'Local and National Influences in the Violence of 1965', dalam Robert Cribb (ed.) *The Indonesian Killings, Monash Papers No.21, 1990* (Clayton, Victoria: Monash University Press, 1990), pp.63–100 (h.77).

<sup>105</sup> Tingkat keterlibatan langsung PKI dalam kudeta 30 September merupakan hal yang diperdebatkan; Rex Mortimer berpendapat bahwa keterlibatan partai waktu itu "bersifat pinggiran" (*Indonesian Communism under Sukarno*, pp. 392–393).

<sup>106</sup> B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982), h.146.

<sup>107</sup> Taksiran "setengah sampai satu juta yang terbunuh" diberikan oleh Y.M. Cheong dalam N. Tarling (ed.) *The Cambridge History of Southeast Asia*, Vol.2, Part 1, h.434.

<sup>108</sup> Sudan merupakan pengecualian. Di sini pemerintah Soviet memprotes keras pada 1971 dan faktanya memutus ikatannya dengan negeri tersebut.

<sup>109</sup> L.C. Brown, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics* (New York: Columbia University Press, 2000), h.111.

<sup>110</sup> Kecuali di Indonesia, di mana, seperti yang sudah kita lihat, keseluruhan sejarah PKI ditandai oleh interaksi antara komunisme dan gerakan-gerakan politis Islam.

<sup>111</sup> L. Medvenko, 'Islam: Two Trends', *New Times* (Moscow), No.13 (1980), pp.23–5.

<sup>112</sup> Deklarasi dibuat pada Maret 1980, dikutip dalam R.O. Freedman, *Soviet Policy Toward the Middle East Since 1970*, edisi ketiga (New York: Praeger, 1982), h.384.

<sup>113</sup> Freedman, *Soviet Policy Toward the Middle East*, h.389.

<sup>114</sup> Galia Golan, *Soviet Policies in the Middle East from World War Two to Gorbachev* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp.189–90.

<sup>115</sup> Freedman, *Soviet Policy Toward the Middle East*, p.442.

<sup>116</sup> Ismael dan Ismael, *The Communist Movement in Syria and Lebanon*, h.148.

<sup>117</sup> Partai Komunis Iraq bergerak dalam arah yang berlawanan, mengambil bagian dalam Dewan Pemerintah yang diciptakan oleh koalisi yang dipimpin Amerika Serikat di Iraq pada 2003 setelah kejatuhan Saddam Hussein: T.Y. Ismael, *The Rise and Fall of the Communist Party of Iraq* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), h.302.

<sup>118</sup> Deklarasi Kairo Kedua, 14 Des. 2003, dalam

---

[http://www.mdsweb.jp/international/cairo\\_sec/cairo2\\_dec.html](http://www.mdsweb.jp/international/cairo_sec/cairo2_dec.html) diakses pada 26 Nov. 2008;  
Eric Walberg, 'Anti-globalists Reach Out to Islamists', *Al-Ahram Weekly*, 5–11 April 2007, dalam  
<http://weekly.ahram.org.eg/2007/839/sc1.htm>. diakses pada 26 Nov. 2008.

<sup>119</sup> Marie Nassif-Debs, 'Hezbollah and Resistance: The viewpoint of the Lebanese Communist Party', *International Viewpoint Online Magazine*, Nov. 2006, dalam  
<http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1159>. diakses pada 26 Nov. 2008.

<sup>120</sup> World Net Daily, 18 June 2007, dalam  
[http://www.worldnetdaily.com/news/archives.asp?AUTHOR\\_ID¼134&PAGE¼235](http://www.worldnetdaily.com/news/archives.asp?AUTHOR_ID¼134&PAGE¼235). diakses  
pada April 2008

---



Artikel ini disebarikan secara swadaya oleh situs independen dan nirlaba  
**Jurnal Sosialis** (<http://jurnalsosialis.red>) untuk kepentingan kajian,  
pergerakan, dan pencerdasan inteligensi kolektif.